



RENSTRA

RENCANA

STRATEGIS

SEKRETARIAT
DAERAH

TAHUN
2025-2029

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3. Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
4. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 memuat gambaran pelayanan, isu strategis termasuk identifikasi permasalahan dan juga rumusan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif Sekretariat Daerah.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 ini dapat menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Jakarta, 29 September 2023

**Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,**


Marulih Mateli
NIP 196511271998031003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR..... iv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....2

1.3 Maksud dan Tujuan.....3

1.4 Sistematika Penulisan.....3

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH 4

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Dearah Provinsi DKI Jakarta 4

2.1.1 Tugas, fungsi, dan struktur Sekretariat Daerah 4

2.1.2 Sumber daya Sekretariat Daerah..... 21

2.1.3 Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah 32

2.1.4 Kelompok sasaran layanan 69

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah..... 69

2.2.1 Reviu Dokumen Perencanaan 69

2.2.2 Identifikasi Permasalahan..... 83

2.2.3 Rumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah 85

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN..... 89

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah 89

3.2 Strategi Renstra Sekretariat Daerah 107

3.3 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2025 - 2029 110

3.4 Penyusunan Pohon Kinerja Renstra Sekretariat Daerah Provinsi
DKI JakartaTahun 2025-2029 111

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 117

4.1 Program Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029..... 117

4.2 Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Tahun 2025-2029 117

BAB 5 PENUTUP..... 183

5.1 Kesimpulan 183

5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi..... 183



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Aset Tetap Menurut Jenis.....	23
Tabel 2.2	Perbandingan Aset Lancar 2023 dan 2024	23
Tabel 2.3	Aset Tetap.....	27
Tabel 2.4	Mutasi peralatan dan mesin	27
Tabel 2.5	Mutasi gedung dan bangunan	28
Tabel 2.6	Mutasi jalan, irigasi, dan jaringan.....	29
Tabel 2.7	Mutasi aset tetap lainnya.....	30
Tabel 2.8	Mutasi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin.....	30
Tabel 2.9	Mutasi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	31
Tabel 2.10	Mutasi akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan.....	32
Tabel 2.11	Target dan Realisasi Kinerja Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2020-2022	34
Tabel 2.12	Target dan Realisasi Kinerja Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2024	62
Tabel 2.13	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	65
Tabel 2.14	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	83
Tabel 2.15	Isu Strategis Sekretariat Daerah	86
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2029	106
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2029	107
Tabel 3.3	Strategi penahapan renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025 - 2029	109
Tabel 3.4	Arah kebijakan renstra Sekretariat Daerah 2025 - 2029.....	110
Tabel 3.5	Rumusan tujuan Renstra berdasarkan Isu Strategis	112
Tabel 3.6	Rumusan sasaran Renstra berdasarkan CSF tujuan Renstra....	113
Tabel 3.7	Rumusan program perangkat daerah berdasarkan CSF sasaran Renstra.....	114
Tabel 4.1	Rincian unit kerja pelaksana program.....	117
Tabel 4.2	Program, kegiatan, subkegiatan, indikator pada renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2029.....	129
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2029	143
Tabel 4.4	Daftar subkegiatan prioritas untuk program prioritas pembangunan daerah	180
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah.....	181
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah	181



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah	6
Gambar 2.2 Sebaran pegawai Sekretariat Daerah.....	21
Gambar 2.3 Sebaran pegawai berdasarkan kelompok usia.....	21
Gambar 2.4 Sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	22
Gambar 2.5 Hubungan antar dokumen kebijakan dan rencana pembangunan	70
Gambar 2.6 Tahapan Implementasi Visi Jakarta 2025-2045	74
Gambar 2.7 Tahap Pertama Implementasi Visi Jakarta Periode 2025-2029	74
Gambar 3.1 Tahapan penyusunan pohon kinerja Sekretariat Daerah	116

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 272 ayat (1); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Surat Edaran Gubernur Nomor e-0003/DE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0014/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat daerah dan unsur pembantu Gubernur menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk periode 2025-2029.

Renstra Sekretariat Daerah Jakarta menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahunan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran secara realistis untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Tim Penyusun Renstra Sekretariat Daerah melaksanakan perumusan dan penyusunan Renstra ini secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Secara simultan atau paralel Tim Penyusun Renstra telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta agar renstra ini tersusun harmonis dan sinergi dengan RPJMD Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025-2029. Tahapan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen Renstra sekretariat daerah provinsi Jakarta mengacu kepada Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0014/SE/2025, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusun Renstra Perangkat Daerah.
2. Perumusan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.
3. Penyusunan rancangan Renstra dan pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

4. Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029.
6. Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
7. Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra periode 2025-2029 ini diharapkan sebagai acuan dan dipedomani setiap unit kerja dari Sekretariat Daerah yang secara struktural menjadi bagian dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang membawahi 10 (sepuluh) Biro sebagai Unit Perangkat Daerah (UKPD) sehingga tugas dan fungsinya mencapai tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan, turut serta mendukung mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025-2029, serta visi dan agenda pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya namun tidak terbatas, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
9. Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (dua puluh) Besar Kota Global Dunia.



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Renstra Sekretariat Daerah adalah untuk menjabarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Adapun tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah adalah :

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah
3. Menjadi acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah
4. Sebagai bentuk kontrak kinerja antara Sekretaris Daerah dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan dari renstra sekretariat daerah ini adalah tersusunnya rencana dan program kerja konkrit yang dibutuhkan untuk dapat mencapai visi dan misi dari gubernur provinsi DKI Jakarta.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 ini terdiri dari 5 (lima) bagian sesuai dengan surat edaran Bappeda No. e-0014/SE/2025 tgl. 07 Mei 2025 dan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 yaitu:

- BAB I** Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan
- BAB II** Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Perangkat Daerah mencakup: Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis Perangkat Daerah termasuk Identifikasi permasalahan dan juga rumusan isu strategis dari Biro-biro
- BAB III** Tujuan dan Sasaran mencakup: Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dari Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- BAB IV** Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Utusan mencakup: uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif. Uraian Subkegiatan juga mencakup target keberhasilan pencapaian tujuan melalui Indikator Kerja Utama (IKU) dari Sekretariat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)
- BAB V** Penutup yang mencakup kesimpulan dan kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Dearah Provinsi DKI Jakarta

2.1.1 Tugas, fungsi, dan struktur Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda merupakan perangkat daerah di Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang memiliki tugas membantu Gubernur serta diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dearah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah sebagai satu kesatuan unsur pimpinan. Sekretaris Daerah mempunyai tugas berikut:

- mengoordinasikan dan menyusun kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- mengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- mengoordinasikan pengelolaan keuangan daerah;
- melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur; dan
- melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan kebijakan, pengordinasian terhadap pelaksanaan tugas PD, dan pelayanan administratif. Sekretariat Dearah menyelenggarakan fungsi berikut:

- penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, serta Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah;
- pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah;
- penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Daerah;
- pengoordinasian dan penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh PD;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi PD;
- pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi;
- penyelenggaraan pemerintahan, hukum, organisasi, reformasi birokrasi, dan kerja sama daerah;
- penyelenggaraan ketatausahaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- j. penyelenggaraan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
- k. pelaksanaan kesekretariatan Sekretariat Daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pada peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022, dijelaskan **tugas dan fungsi lain** untuk seluruh unit kerja di dalam Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran PD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Dalam melaksanakan layanan internal dan publik selain di bantu oleh Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah juga didukung oleh unit kerja struktural perangkat daerah (lihat gambar 2.1), terdiri atas:

1. Asisten pemerintahan, terdiri atas Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang membawahi Subbagian Tata Usaha, Biro Kepala Daerah, serta Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah;
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan, terdiri atas Biro Perekonomian dan Keuangan serta Biro Kerja Sama Daerah;
3. Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup yang membawahi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Biro Kesejahteraan Sosial serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
5. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana lainnya.

Sekretariat Daerah juga memiliki unit kerja nonstruktural yang terdiri atas Kelompok pada Biro Pemerintahan, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro Perekonomian dan Keuangan, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Biro Kesejahteraan Sosial serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dan juga subkelompok pada bagian Kelompok.



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Gambar 2.1. Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah



Sumber: Pergub DKI Jakarta No.57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

2.1.1.1 Asisten Pemerintahan

Asisten pemerintahan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam:

- a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang kesatuan bangsa dan politik, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, bidang kepegawaian, bidang pengembangan sumber daya manusia, dan kesekretariatan DPRD;
- b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang kesatuan bangsa dan politik, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, bidang kepegawaian, bidang pengembangan sumber daya manusia, dan kesekretariatan DPRD;
- c. mengoordinasikan pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi PD lingkup Asisten Pemerintahan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan bidang pemerintahan, bidang hukum, organisasi dan reformasi birokrasi, ketatausahaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta kesekretariatan Sekretariat Daerah;



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Sekretaris Daerah; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan.

Perangkat Daerah di bawah koordinasi **Asisten Pemerintah** adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD;
- b. Inspektorat;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
- f. Satpol PP
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Badan Kepegawaian Daerah;
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. Kota Administrasi; dan
- m. Kabupaten Administrasi.

Tugas dan fungsi biro-biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui **Asisten Pemerintah** sebagai berikut:

- 1) **Biro Pemerintahan**, dipimpin oleh Kepala Biro Pemerintahan. Biro Pemerintahan mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan bidang kesatuan bangsa dan politik serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan kesekretariatan DPRD serta bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, perangkat kewilayahan dan pengaduan.

Biro Pemerintahan terdiri atas:

- a. Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kapasitas Daerah;
- b. Subbagian Tata Usaha, dan
- c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Unit Kerja Nonstruktural pada biro pemerintahan terdiri atas:

- a. Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- b. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum
- c. Kelompok Tata Praja
- d. Kelompok Pengaduan

Biro Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- c. pengoordinasian, perumusan, dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pengoordinasian, perumusan, dan penyusunan kebijakan pemerintahan bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, perangkat kewilayahan dan pengaduan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, perangkat kewilayahan dan pengaduan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, perangkat kewilayahan dan pengaduan;
- i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, perangkat kewilayahan dan pengaduan;
- k. fasilitasi Asisten Pemerintahan dalam pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan kesekretariatan DPRD;
- l. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
- m. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memori serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- n. fasilitasi pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- o. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Hari Jadi Provinsi;
- p. fasilitasi forum, organisasi, dan/atau asosiasi pemerintah, antara lain Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Kota Seluruh Indonesia, dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia;

- q. pelaksanaan kesekretariatan Biro Pemerintahan;
- r. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Pemerintahan;
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan; dan
- t. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Pemerintahan.

- 2) **Biro Hukum**, dipimpin oleh kepala Biro Hukum. Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan terkait penyusunan produk hukum daerah, dokumentasi dan informasi hukum, advokasi hukum, pelayanan hukum, dan peningkatan pengetahuan hak asasi manusia.

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan I yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan II;
- c. Bagian Advokasi Hukum;
- d. Bagian Pelayanan Hukum; dan
- e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Unit Kerja Nonstruktural pada Biro Hukum terdiri atas:

- a. Kelompok Kelembagaan
- b. Kelompok Analisis Jabatan
- c. Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik
- d. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja

Biro Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pelaksanaan perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dalam penyusunan produk hukum daerah, advokasi hukum, pelayanan hukum, dan peningkatan pengetahuan hak asasi manusia;
- d. pelaksanaan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, pengoordinasian pengharmonisasian serta pemantapan dan pembulatan konsepsi rancangan produk hukum daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pengkajian produk hukum daerah;
- f. pelaksanaan pelayanan perkara nonlitigasi;
- g. pelaksanaan advokasi hukum perkara litigasi;
- h. pelaksanaan pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, publikasi, sosialisasi, dokumentasi, pengelolaan kearsipan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta pengelolaan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- i. peningkatan pengetahuan Hak Asasi Manusia;
- j. pelaksanaan kesekretariatan Biro Hukum;
- k. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Hukum;
- l. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Biro Hukum;



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum; dan
- n. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah, dan/atau Asisten Pemerintahan.

3) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, dipimpin oleh kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, dan menyusun kebijakan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, tatalaksana, pelayanan publik, reformasi birokrasi, budaya kerja, dan akuntabilitas kinerja.

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Unit Kerja Nonstruktural pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

- a. Kelompok Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja
- b. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah
- c. Kelompok Keuangan Daerah

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan dalam bidang kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, tatalaksana, pelayanan publik, reformasi birokrasi, budaya kerja, dan akuntabilitas kinerja;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, tatalaksana, pelayanan publik, reformasi birokrasi, budaya kerja, dan akuntabilitas kinerja;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam dalam bidang kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, tatalaksana, pelayanan publik, reformasi birokrasi, budaya kerja dan akuntabilitas kinerja;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi dalam bidang kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, tatalaksana, pelayanan publik, reformasi birokrasi, budaya kerja, dan akuntabilitas kinerja;
- g. fasilitasi Asisten Pemerintahan dalam pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan serta pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

- h. pelaksanaan kesekretariatan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
 - i. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
 - j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
 - k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah, dan/atau Asisten Pemerintahan.
- 4) **Biro Kepala Daerah**, dipimpin oleh kepala Biro Kepala Daerah. Biro Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan administrasi, keprotokolan, persidangan, pelayanan tamu Gubernur dan Wakil Gubernur, pelaksanaan ketatausahaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pelaksanaan pengetikan dan penaklikan naskah dinas pimpinan.

Biro Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Kepala Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Administrasi Gubernur;
 - 2) Subbagian Administrasi Wakil Gubernur; dan
 - 3) Subbagian Pelayanan Tamu;
- b. Bagian Protokol, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Protokol I;
 - 2) Subbagian Protokol II; dan
 - 3) Subbagian Protokol III;
- c. Bagian Persidangan, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Persidangan I;
 - 2) Subbagian Persidangan II; dan
 - 3) Subbagian Jamuan;
- d. Bagian Naskah Dinas, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Pengetikan dan Penaklikan; dan
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Biro Kepala Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- b. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan administrasi, persidangan dan pelayanan tamu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi administrasi, persidangan dan pelayanan tamu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan keprotokolan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- e. pengoordinasian, penyiapan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi keprotokolan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- f. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengetikan dan penaklikan naskah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. penyelenggaraan upacara peringatan hari-hari besar nasional serta keagamaan di daerah;
- h. penyiapan kebutuhan logistik kantor Gubernur dan Wakil Gubernur;
- i. fasilitasi pemberian dukungan konsumsi kepada PD/UKPD dalam pelaksanaan acara Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Deputi Gubernur;
- j. pembinaan keprotokolan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- k. pelaksanaan kesekretariatan Biro Kepala Daerah;
- l. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kepala Daerah;
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kepala Daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan/atau Asisten Pemerintahan.

5) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah, dipimpin oleh kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan pengamanan dalam kompleks gedung balaikota dan rumah dinas pimpinan, pelayanan kompleks gedung balaikota, perlengkapan dan sarana acara, pengelolaan administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur serta pengelolaan ketatausahaan Sekretariat Daerah.

Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Bangunan Gedung;
 - 2) Subbagian Jaringan Listrik; dan
 - 3) Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi;
- b. Bagian Pengamanan, Pelayanan, dan Perlengkapan, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Pengamanan Dalam;
 - 2) Subbagian Pelayanan Balaikota; dan
 - 3) Subbagian Perlengkapan dan Sarana Acara Pimpinan;
- c. Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Administrasi Sekretaris Daerah;
 - 2) Subbagian Administrasi Deputi Gubernur dan Asisten; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- d. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Pelaporan Keuangan dan Aset;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- c. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan rumah tangga kompleks gedung balaikota dan rumah dinas pimpinan;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan pengamanan dalam kompleks gedung balaikota dan rumah dinas pimpinan;
- e. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan penggunaan kompleks gedung balaikota;
- f. pengoordinasian, penyiapan, pemantauan dan evaluasi perlengkapan dan sarana acara;
- g. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur;
- h. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi ketatausahaan ketatausahaan Sekretariat Daerah;
- i. pelaksanaan kesekretariatan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah;
- j. perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah;
- k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah, dan/atau Asisten Pemerintahan.

2.1.1.2 Asisten Perekonomian dan Keuangan

Asisten Perekonomian dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam:

- a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perhubungan, bidang tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batubara, sub urusan bidang energi baru terbarukan, dan sub urusan bidang ketenagalistrikan), bidang penanaman modal, bidang pangan, kelautan dan perikanan, pertanian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan (keuangan, pendapatan, aset, pengadaan barang/jasa, dan badan usaha milik daerah);
- b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perhubungan, bidang tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batubara, sub urusan bidang energi baru terbarukan, dan sub urusan bidang ketenagalistrikan), bidang penanaman modal, bidang pangan, kelautan dan perikanan, pertanian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan (keuangan, pendapatan, aset, pengadaan barang/jasa, dan badan usaha milik daerah);
- c. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi daerah;
- d. mengoordinasikan pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi PD lingkup Asisten Perekonomian dan Keuangan;



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama daerah;
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Sekretaris Daerah; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Perekonomian dan Keuangan.

Perangkat Daerah di bawah koordinasi **Asisten Perekonomian dan Keuangan** adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian;
- c. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi;
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Badan Pengelolaan Aset Daerah;
- i. Badan Pendapatan Daerah;
- j. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- k. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

Tugas dan fungsi biro-biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui **Asisten Perekonomian dan Keuangan** sebagai berikut:

- 1) **Biro Perekonomian dan Keuangan**, dipimpin oleh kepala Biro Perekonomian dan Keuangan. Biro Perekonomian dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perhubungan, bidang tenaga kerja, transmigrasi, energi, bidang penanaman modal, bidang pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian, dan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Biro Perekonomian dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Biro Perekonomian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian, perumusan, dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perhubungan, bidang tenaga kerja, transmigrasi, energi, bidang penanaman modal, bidang pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian, dan bidang ekonomi daerah;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perhubungan, bidang tenaga kerja, transmigrasi, energi, bidang penanaman modal, bidang pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian, dan bidang ekonomi daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perhubungan, bidang tenaga



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- kerja, transmigrasi, energi, bidang penanaman modal, bidang pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian, dan bidang ekonomi daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perhubungan, bidang tenaga kerja, transmigrasi, energi, bidang penanaman modal, bidang pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian, dan bidang ekonomi daerah;
 - e. fasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perekonomian dan keuangan;
 - f. pelaksanaan kesekretariatan Biro Perekonomian dan Keuangan;
 - g. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Perekonomian dan Keuangan;
 - h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Keuangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.
- 2) Biro Kerjasama Daerah**, dipimpin oleh kepala Biro Kerjasama Daerah. Biro Kerja Sama Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan kerja sama daerah dan perjalanan dinas.

Biro Kerjasama Daerah terdiri atas:

- a. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri;
- b. Bagian Kerja Sama Luar Negeri;
- c. Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga;
- d. Bagian Perjalanan Dinas, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas; dan
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Biro Kerjasama Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pengoordinasian, perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan kerja sama daerah, fasilitasi korps diplomatik dan perjalanan dinas;
- d. penyusunan analisis dan pertimbangan terhadap usulan kerja sama daerah, fasilitasi korps diplomatik dan perjalanan dinas;
- e. pengoordinasian PD, mitra kerja sama, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Perwakilan RI lainnya di luar negeri dan pihak lain dalam penyelenggaraan kerja sama daerah, fasilitasi korps diplomatik dan perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan penyusunan naskah sinergi, nota kesepakatan, kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, dan nota kesepahaman/nota kesepakatan;



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama daerah, fasilitasi korps diplomatik dan perjalanan dinas;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan kerja sama daerah, fasilitasi korps diplomatik dan perjalanan dinas;
- i. penyusunan laporan penyelenggaraan kerja sama daerah;
- j. fasilitasi pembentukan dan pelaksanaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah
- k. fasilitasi forum, organisasi, dan/atau asosiasi kerja sama daerah;
- l. pengoordinasian dan pemberian pertimbangan dalam pelaksanaan belanja hibah dan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lain dalam negeri, pemerintah daerah lain luar negeri, lembaga luar negeri serta forum, organisasi, dan/atau asosiasi kerja sama daerah;
- m. pelaksanaan kesekretariatan Biro Kerja Sama Daerah;
- n. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kerja Sama Daerah;
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kerja Sama Daerah; dan
- p. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah, dan/atau Asisten Perekonomian dan Keuangan.

2.1.1.3 Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup

Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam:

- a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), bidang pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang penyelenggaraan penerangan jalan umum;
- b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), bidang pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang penyelenggaraan penerangan jalan umum;
- c. mengoordinasikan pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi PD lingkup Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Sekretaris Daerah; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Perangkat Daerah di bawah koordinasi **Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup** adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan;
- b. Dinas Bina Marga;
- c. Dinas Sumber Daya Air;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota; dan
- f. Dinas Lingkungan Hidup.



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tugas dan fungsi biro-biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui **Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup** sebagai berikut:

- 1) **Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup**, dipimpin oleh kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, jasa konstruksi, permukiman, persampahan), bidang energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), bidang pertanahan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan serta bidang penyelenggaraan penerangan jalan umum, jaringan utilitas, dan infrastruktur transportasi.

Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Unit Kerja Nonstruktural pada biro pembangunan dan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. Kelompok Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- b. Kelompok Penataan Ruang, Cipta Karya, dan Pertanahan
- c. Kelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau
- d. Kelompok Pembangunan Kota.

Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), bidang pertanahan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan serta bidang penyelenggaraan penerangan jalan umum, jaringan utilitas dan infrastruktur transportasi;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), bidang pertanahan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan serta bidang penyelenggaraan penerangan jalan umum, jaringan utilitas dan infrastruktur transportasi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi),



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- bidang pertanahan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan serta bidang penyelenggaraan penerangan jalan umum, jaringan utilitas dan infrastruktur transportasi;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), bidang pertanahan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan serta bidang penyelenggaraan penerangan jalan umum, jaringan utilitas dan infrastruktur transportasi;
 - g. pelaksanaan kesekretariatan Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - h. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
 - j. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

2.1.1.4 Asisten Kesejahteraan Rakyat

Asisten Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam:

- a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang perpustakaan dan kearsipan, dan bidang mental spiritual;
- b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang perpustakaan dan kearsipan, dan bidang mental spiritual;
- c. mengoordinasikan pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi PD lingkup Asisten Kesejahteraan Rakyat;
- d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Sekretaris Daerah; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Kesejahteraan Rakyat.

Perangkat Daerah di bawah koordinasi **Asisten Kesejahteraan Rakyat**, adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Kebudayaan;
- e. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- f. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk; dan
- g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tugas dan fungsi biro-biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui **Asisten Kesejahteraan Rakyat** sebagai berikut:

- 1) **Biro Kesejahteraan Sosial**, dipimpin oleh kepala Biro Kesejahteraan Sosial. Biro Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang kepemudaan dan olahraga.

Biro Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Unit Kerja Nonstruktural pada biro kesejahteraan rakyat terdiri atas:

- a. Kelompok Kesehatan
- b. Kelompok Sosial, Kepemudaan, dan Olahraga
- c. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Biro Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga;
- g. pelaksanaan kesekretariatan Biro Kesejahteraan Sosial;
- h. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kesejahteraan Sosial;
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial; dan



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- j. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah, dan/atau Asisten Kesejahteraan Rakyat.

2) **Biro Pendidikan dan Mental Spiritual**, dipimpin oleh kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan dan kearsipan serta bidang mental spiritual.

Biro Pendidikan dan Mental Spritual terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Unit Kerja Nonstruktural pada biro pendidikan dan mental spiritual terdiri atas:

- a. Kelompok Pendidikan
- b. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan
- c. Kelompok Mental Spiritual

Biro Pendidikan dan Mental Spritual menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan dan kearsipan serta bidang mental spiritual;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan dan kearsipan serta bidang mental spiritual;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan dan kearsipan serta bidang mental spiritual;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan dan kearsipan serta bidang mental spiritual;
- g. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji;
- h. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan mental spiritual;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan belanja hibah penyelenggaraan mental spiritual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan kesekretariatan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
- k. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; dan
- m. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah, dan/atau Asisten Kesejahteraan Rakyat.

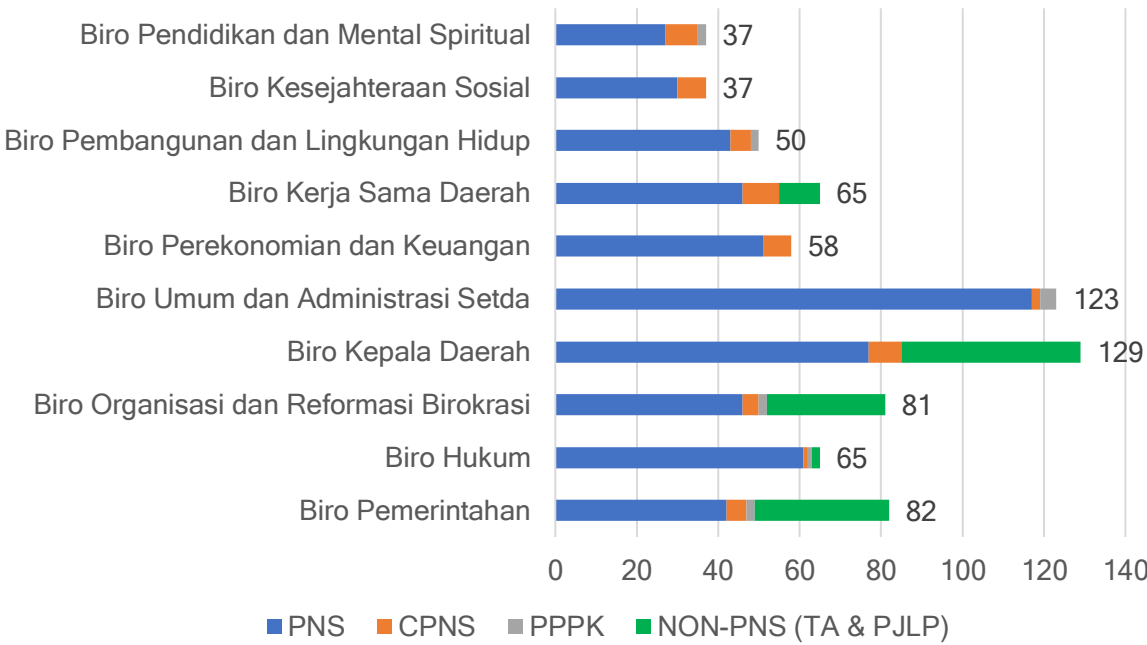


2.1.2 Sumber daya Sekretariat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh 727 pegawai yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 609 orang (83,77%) dan Non ASN sebanyak 118 orang (16,23%). ASN merupakan gabungan dari PNS, CPNS, dan PPPK. Sedangkan Non ASN merupakan TA (Tenaga Ahli) dan PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan). Pegawai Sekretariat Daerah tersebar pada 10 Biro yang ada, untuk sebaran pegawai perbiro dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

Gambar 2.2 Sebaran pegawai Sekretariat Daerah



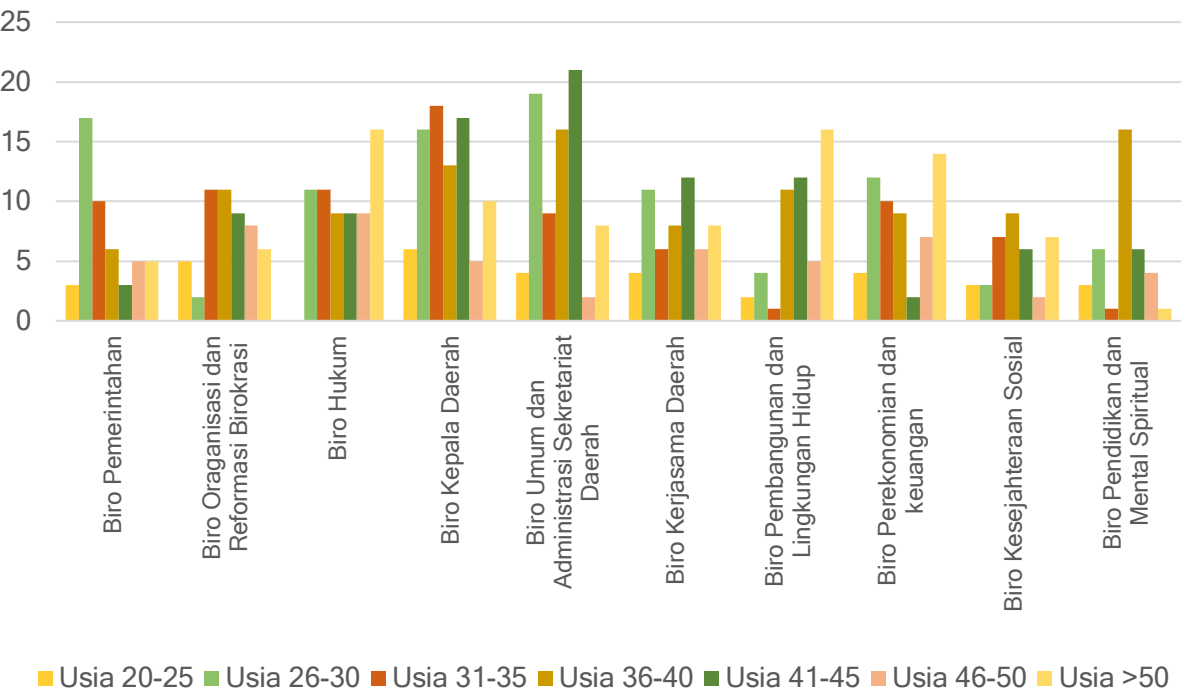
Sumber data: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta, Juli 2025

Berdasarkan kelompok usia, kelompok usia paling banyak yaitu pada rentang usia 36 – 40 tahun sebesar 108 orang atau 19% dari total pegawai. Pegawai rentang usia 20 – 25 tahun sebanyak 34 orang (6%), usia 26 – 30 tahun sebanyak 101 (18%), usia 31 – 35 tahun sebanyak 85 orang (15%), usia 41 – 45 tahun sebanyak 97 orang (17%), usia 46 – 50 tahun sebanyak 53 orang (9%), serta usia >50 tahun sebanyak 91 orang (16%).

Gambar 2.3 Sebaran pegawai berdasarkan kelompok usia



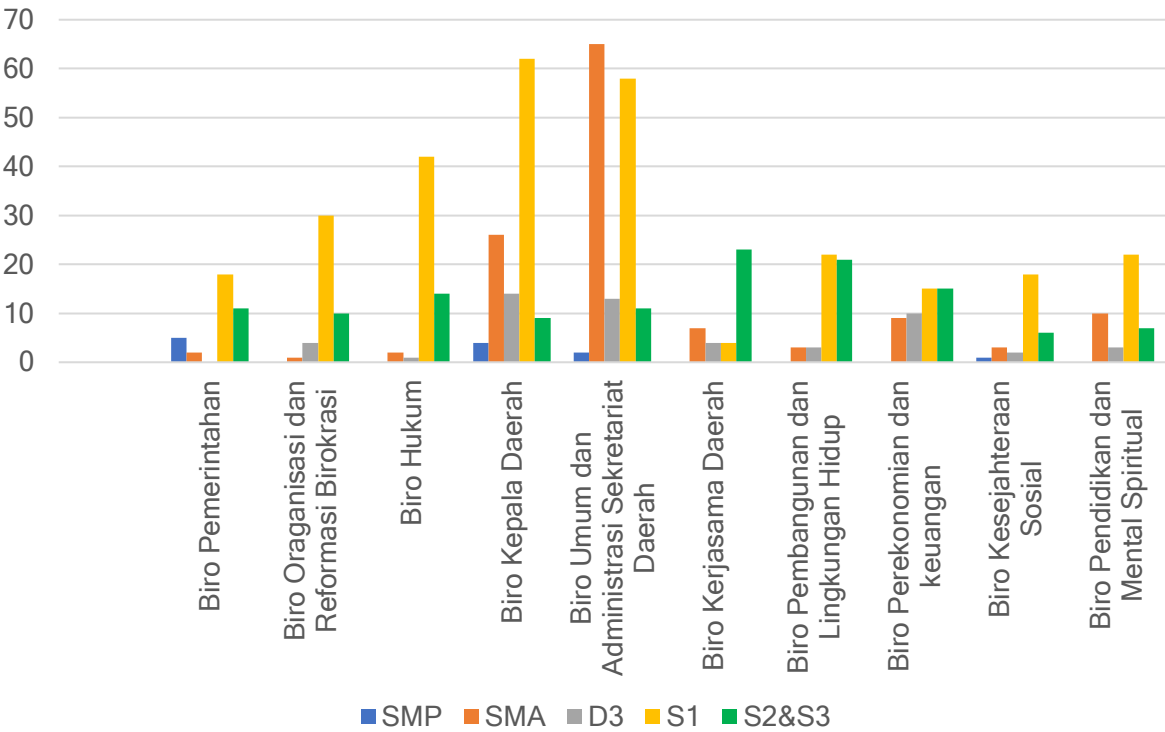
RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029



Sumber data: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Juli 2025

Berdasarkan karakteristik pendidikan secara dominan pada golongan S1/DIV sebesar 467 orang (59%), golongan S2 sebesar 115 orang (14%), golongan D-III sebesar 113 orang (14%), dan SMA sebesar 95 orang (12%). Tabel 2.5 profil sumber daya manusia berdasarkan golongan tingkat pendidikan.

Gambar 2.4 Sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan



Sumber data: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Juli 2025



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

2.1.2.2 Aset atau Modal

Aset atau modal berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi kendaraan operasional, gedung kantor dan rumah dinas, serta peralatan kantor. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang baik dibutuhkan dalam menunjang kinerja pegawai.

Berdasarkan laporan aset semester II 2024 dan juga standard akuntansi ETAP pembagian aset pada sekretariat daerah Provinsi DKI Jakarta didasarkan kepada jenis aset seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah Aset Tetap Menurut Jenis

No	Jenis Aset/Modal	31 Des 2023	31 Des 2024
1	Aset Lancar	1.680.362.162	3.186.434.625
2	Aset Tetap	984.665.745.043	882.987.948.425
3	Aset Lainnya	69.379.537	2.361.634.901

Sumber : Laporan Aset Sekretariat Daerah Semester II 2024, 2025

Dari tabel diatas, kondisi aset menurut jenis terdiri atas (a) lancar yang dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; (b) tidak lancar yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; (c) lainnya yang tidak dapat dicairkan dalam waktu 12 bulan dan juga bukan berupa aset yang dapat dikuantifikasi atau ada secara wujud.

Aset Lancar

Rincian aset lancar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Perbandingan Aset Lancar 2023 dan 2024

Uraian	31-12-2024	31-12-2023
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	78.750.256.077	79.896.564.286
Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah	76.801.418.133	79.739.410.533
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	1.948.837.944	157.153.753
Penyisihan Piutang	(76.801.418.133)	(79.739.410.533)
Penyisihan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/ murah	(76.801.418.133)	(79.739.410.533)
Belanja Dibayar Dimuka	348.332.673	335.343.152
Belanja Barang Dibayar Dimuka	300.783.339	285.876.485
Belanja Jasa Dibayar Dimuka	47.549.334	49.466.667
Persediaan	889.264.008	1.187.865.257
Barang Pakai Habis	889.264.008	1.187.865.257
TOTAL ASET LANCAR	3.186.434.625	1.680.362.162

Sumber : Laporan Aset Sekretariat Daerah Semester II 2024, 2025



1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas adalah aset yang paling lancar (liquid), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand), rekening giro, dan rekening deposito.

Untuk saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2023 (Audited) senilai Rp0,-. Sedangkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 senilai Rp0,-.

2. Piutang

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang yang terdapat di lingkup koordinasi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta yaitu Piutang Kompensasi Rusun. Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah adalah kewajiban untuk membangun rumah susun sederhana yang dikonversi dalam bentuk uang sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2002 tentang ketentuan perhitungan nilai kewajiban penyediaan bangunan rumah susun sederhana/murah yang dikonversi dengan dana oleh para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT). Keputusan Gubernur No. 540 Tahun 1990 menyatakan bahwa pembebasan terhadap lahan dengan luas 5.000 m² atau lebih terhadap lahan yang peruntukannya sebagai hunian dan/atau terdapat hunian di lahan tersebut, maka pemohon SIPPT diwajibkan membiayai dan membangun RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersil. Ketentuan lokasi dan persyaratan penjualan RSM tersebut ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di lahan milik pemegang SIPPT maka bangunan RSM menjadi milik pemegang SIPPT. Keputusan Gubernur No. 640 Tahun 1992 menyatakan bahwa pemegang SIPPT yang membebaskan lahan seluas 5.000 m² atau lebih tanpa Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dikenakan sanksi berupa:

- 1) Membiayai dan membangun sampai siap huni RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersil dengan ketentuan bahwa lokasi, jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di atas lahan milik pemegang SIPPT maka, lahan dan bangunan RSM adalah milik pemegang SIPPT.
- 2) Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan yang lokasi, jenis dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lainnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Saldo Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2023 (Audited) sebesar Rp79.896.564.286,00. Saldo tersebut terdiri dari:

- 1) Piutang Hibah yang terdapat di Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp79.739.410.533,-.
- 2) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Luar Negeri Biro Kerja Sama Daerah senilai Rp115.382.280,- dengan STS No.2024.M40601908.000002 Tanggal 21 Februari 2024.
- 3) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Biro Kerja Sama Daerah sebesar Rp19.647.873,- dengan STS No.2024.M40601908.000001 Tanggal 21 Februari 2024.
- 4) Pengembalian kelebihan pembayaran atas dua pekerjaan pemeliharaan Gedung dan Bangunan senilai Rp11.673.700,- dengan STS No.3240098298 Tanggal 23 April 2024.
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran atas dua pekerjaan pemeliharaan Gedung dan Bangunan senilai Rp10.449.900,- dengan STS No.3240098297 Tanggal 23 April 2024.

Sedangkan saldo Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 sebesar Rp78.750.256.077,-. Saldo tersebut merupakan:

- 1) Piutang Pendapatan dari Pengembalian yang terdapat di Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta senilai Rp119.249.646.00,-.
- 2) Piutang Pendapatan dari Pengembalian yang terdapat di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp30.623.234,-.
- 3) Piutang Pendapatan dari Pengembalian yang terdapat di Biro Kerjasama Daerah senilai Rp1.798.965.064,-
- 4) Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah yang terdapat di Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp76.801.418.133,-.

3. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Saldo penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2023 (Audited) adalah senilai Rp(79.739.410.533,-). Sedangkan saldo penyisihan piutang tak tertagih Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp(76.801.418.133,-).

4. Belanja dibayar dimuka

Pada neraca saldo Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2023 (Audited) senilai Rp335.343.152,00. Saldo tersebut merupakan:

- 1) Deposit BBM yang sampai dengan 31 Desember 2023 yang masih ada di pihak ketiga (PT Pertamina) yang terdapat di Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp285.640.788,00.



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Dan saldo di Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta senilai Rp235.697,00.

- 2) Beban Jasa Dibayar Dimuka Jasa pada Biro Perekonomian berupa sewa video conference. Nilai yang diakui sebagai Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp1.766.667,00.
- 3) Beban Jasa Dibayar Dimuka Jasa pada Biro Kerja Sama Daerah berupa sewa video conference. Nilai yang diakui sebagai Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp47.700.000,00.

Sedangkan saldo Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) 31 Desember 2024 senilai Rp348.332.673,00. Saldo tersebut merupakan:

- 1) Deposit BBM yang sampai dengan 31 Desember 2023 yang masih ada di pihak ketiga (PT Pertamina) yang terdapat di Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp300.546.476,00. Dan saldo di Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta senilai Rp236.863,00.
- 2) Beban Jasa Dibayar Dimuka Jasa pada Biro Kepala Daerah berupa Belanja *Lisensi Video Conference* skala Pro (29 April 2024 - 29 April 2025) nilai yang diakui sebagai Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp888.000,00, Belanja *Lisensi Video Conference* skala Pro (01 Mei 2024 - 01 Mei 2025) nilai yang diakui sebagai Beban Jasa Dibayar Dimuka senilai Rp888.000,00, Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 3 Unit *Microsoft 365 One Year* (Juni 2024 - Juni 2025) nilai yang diakui sebagai Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp3.330.000,00, Belanja Sewa Komputer Jaringan *Google Workspace 1 Tahun (April 2024 - April 2025)* nilai yang diakui sebagai Beban Jasa Dibayar Dimuka senilai Rp5.450.000,00.
- 3) Beban Jasa Dibayar Dimuka Jasa pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda berupa *Lisensi Video Conference* nilai yang diakui sebagai Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp10.200.000,00.
- 4) Beban Jasa Dibayar Dimuka Jasa pada Biro Kerjasama Daerah berupa *Lisensi Video Conference* nilai yang diakui sebagai Beban Jasa Dibayar Dimuka senilai Rp24.276.667,00.
- 5) Beban Jasa Dibayar Dimuka Jasa pada Biro Perekonomian dan Keuangan berupa *Lisensi Video Conference* nilai yang diakui sebagai Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp1.666.667,00, *Google Drive* nilai yang diakui sebagai Beban Jasa Dibayar Dimuka senilai Rp850.000,00.

5. Persediaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kebijakan Akuntansi Persediaan mengalami perubahan yaitu adanya pengklasifikasian persediaan. Persediaan diklasifikasikan menjadi persediaan bahan pakai habis, persediaan bahan/material dan persediaan barang lainnya.

Pada Neraca per 31 Desember 2023 (Audited) sebesar Rp1.187.865.257,00, saldo tersebut merupakan Barang Pakai Habis yang terdapat dilingkup Sekretariat Daerah per 31 Desember 2022. Sedangkan saldo Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 senilai Rp889.264.008,00.



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Aset Tetap

Rincian Aset Tetap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Aset Tetap

Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Tanah	468.512.780.000	468.512.780.000
2.	Peralatan dan Mesin	153.021.270.704	143.995.316.568
3.	Gedung dan Bangunan	1.096.880.222.610	1.386.021.415.414
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.318.835.697	11.156.606.867
5.	Aset Tetap Lainnya	541.654.457	406.879.407
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
7.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 87.376.558.255	-111.871.412.299
8.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 753.519.257.603	-907.839.238.636
9.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	- 7.238.447.935	-5.591.006.038
10.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	- 152.551.250	-125.596.240
	Jumlah	882.987.948.425	984.665.745.043

Sumber : Laporan Aset Sekretariat Daerah Semester II 2024, 2025

1. Tanah

Saldo aset tetap berupa tanah pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 senilai Rp468.512.780.000,- dan Rp468.512.780.000,-.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp143.995.316.568,- dan Rp153.021.270.704,- Mutasi pada peralatan dan mesin terlampir pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Mutasi peralatan dan mesin

Saldo per 31 Desember 2023	143.995.316.568
Penambahan	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	43.164.561.750
Transfer Masuk dari SKPD Lain	2.268.554.693
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	9.265.593.335
Kapitalisasi dari Beban Jasa	1.429.660.908



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Pengurangan	
Transfer Keluar ke SKPD Lain	179.943.923
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	1.241.336.588
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	26.266.208.244
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	17.170.313.955
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 ke Beban Pemeliharaan	101.000.000
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)	2.138.822.310
Belanja Modal Tahun 2024 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	4.791.530
Saldo per 31 Desember 2024	153.021.270.704

Sumber : Laporan Aset Sekretariat Daerah Semester II 2024, 2025

Transfer masuk dan keluar aset peralatan dan mesin yang terdapat dilingkup Sekretariat Daerah TA 2024 merupakan transfer masuk dan keluar berupa Kendaraan Dinas Operasional yang berasal dari BPAD Pusat Penyimpanan Barang Daerah.

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.386.021.415.414,- dan Rp1.096.880.222.610,-. Mutasi pada Gedung dan Bangunan terlampir pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Mutasi gedung dan bangunan

Saldo per 31 Desember 2023	1.386.021.415.414
Penambahan	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	2.224.341.935
Transfer Masuk dari SKPD Lain	255.840.724.524
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	1.241.336.588
Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	13.761.186.449
Pengurangan	
Transfer Keluar dari SKPD Lain	559.481.144.365
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	2.224.341.935
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	503.296.000
Saldo per 31 Desember 2024	1.096.880.222.610

Sumber : Laporan Aset Sekretariat Daerah Semester II 2024, 2025



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Untuk realisasi belanja modal Gedung dan bangunan merupakan pembelian 612 signage atau papan petunjuk dengan realisasi belanja senilai Rp2.214.620.000,- dan pembelian 1 unit DVR CCTV 16 Channel sebesar Rp9.721.935,- dengan menggunakan koderekening belanja modal gedung dan bangunan, dan di reklasifikasi menjadi aset peralatan dan mesin.

Untuk transfer masuk dari SKPD Lain senilai Rp255.840.724.524,- merupakan:

- 1. Biaya Rehab/Pemeliharaan Gedung DPRD-Blok H (Balai kota) sebesar Rp245.283.573.884,-.
- 2. Transfer Diskominfotik KIB C ke Biro Umum & Adm. Sekda sesuai BAST No 4032/PU.04.00 tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp3.766.292.451,-.
- 3. Rehabilitasi Bangunan Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta dari Dinas Citata sesuai dengan BAST No.1586/RR.01.02 Tgl.12 Juni 2024 sebesar Rp127.109.660,-.

Sedangkan Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan senilai Rp13.761.186.449,00 merupakan :

- 1. Renovasi Gd Grha Ali Sadikin sebesar Rp11.151.737.563,-
- 2. Renovasi Gd Blok B senilai Rp1.415.114.950,-
- 3. Renovasi Gd Blok A sebesar Rp1.031.676.046,-
- 4. Renovasi Gd Blok H senilai Rp162.657.890,-

Terdapat pengurangan nilai Gedung dan Bangunan yakni transfer keluar ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta pekerjaan renovasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan yakni Renovasi Gedung DPRD Blok H Tahun Perolehan 2014 senilai Rp559.481.144.365,-.

Untuk pengurangan akibat Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat merupakan pengurangan nilai rumah dinas di jalan Denpasar yang saat ini sedang proses penghapusan, senilai Rp503.296.000,-.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.156.606.867,- dan Rp12.318.835.697,-. Mutasi pada jalan, irigasi, dan jaringan terlampir pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Mutasi jalan, irigasi, dan jaringan

Saldo per 31 Desember 2023	11.156.606.867
Penambahan	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	7.041.251.400
Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	1.162.228.830
Pengurangan	



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Reklasifikasi Antar Aset Tetap	7.041.251.400
Saldo per 31 Desember 2024	12.318.835.697

Sumber : Laporan Aset Sekretariat Daerah Semester II 2024, 2025

Untuk realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pembelian 22 unit lampu yang menggunakan koderekening belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Pengurangan akibat Reklasifikasi Antar Aset Tetap adalah reklasifikasi belanja modal pembelian 22 unit lampu yang menggunakan koderekening belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp406.879.407,- dan Rp541.654.457,- . Mutasi pada aset tetap lainnya tersebut terlampir pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Mutasi aset tetap lainnya

Saldo per 31 Desember 2023	406.879.407
Penambahan	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	134.775.050
Saldo per 31 Desember 2024	541.654.457

Sumber : Laporan Aset Sekretariat Daerah Semester II 2024, 2025

Untuk realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya merupakan pembelian 16 unit Alat Musik Modern/Band serta 1 unit drum yang menggunakan koderekening belanja modal Aset Tetap Lainnya.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan.

7. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(111.871.412.299,-) dan Rp(87.376.558.255,-). Mutasi pada akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tersebut terlampir pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Mutasi akumulai penyusutan peratalan dan mesin

Saldo per 31 Desember 2023	(111.871.412.299)
Penambahan	
Beban Penyusutan 2024	15.809.831.135
Transfer Masuk dari SKPD Lain	919.917.193
Koreksi Kurang Catat	31.235.401
Pengurangan	
Transfer Keluar ke SKPD Lain	80.071.396



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	25.858.976.400
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	15.316.789.977
Saldo per 31 Desember 2024	(87.376.558.255)

Sumber : Laporan Aset Sekretariat Daerah Semester II 2024, 2025

Akumulasi penyusutan berupa Transfer masuk dan keluar aset peralatan dan mesin yang terdapat dilingkup Sekretariat Daerah TA 2024 merupakan nilai akumulasi penyusutan transfer masuk dan keluar berupa Kendaraan Dinas Operasional yang berasal dari BPAD Pusat Penyimpanan Barang Daerah.

8. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(907.839.238.636,00) dan Rp(753.519.257.603,00). Mutasi pada Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tersebut terlampir pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Mutasi akumulai penyusutan gedung dan bangunan

Saldo per 31 Desember 2023	(907.839.238.636)
Penambahan	
Beban Penyusutan 2024	43.111.999.205
Transfer Masuk dari SKPD Lain	126.535.189.053
Koreksi Kurang Catat	32.138.881.589
Pengurangan	
Transfer Keluar ke SKPD Lain	229.294.049.027
Koreksi Lebih Catat	126.535.189.053
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	276.812.800
Saldo per 31 Desember 2024	(753.519.257.603)

Sumber : Laporan Aset Sekretariat Daerah Semester II 2024, 2025

Transfer Masuk dari SKPD Lain sebesar Rp126.535.189.053,00 merupakan :

1. Biaya Rehab/Pemeliharaan Gedung DPRD-Blok H (Balai kota) sebesar Rp122.641.786.942,-.
2. Transfer Diskominfo KIB C ke Biro Umum & Adm. Sekda sesuai BAST No 4032/PU.04.00 tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp3.766.292.451,-.
3. Rehabilitasi Bangunan Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta dari Dinas Citata sesuai dengan BAST No.1586/RR.01.02 Tgl.12 Juni 2024 sebesar Rp127.109.660,-.



Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp276.812.800,- merupakan akumulasi biaya Renovasi Rudin Denpasar berasal dari Dinas Perumahan, yang dimana induknya berada di KIB ARB.

Untuk Koreksi Lebih Catat senilai Rp126.535.189.053,- merupakan :

- 1. Biaya Rehab/Pemeliharaan Gedung DPRD-Blok H (Balaikota) sebesar Rp122.641.786.942,-.
- 2. Transfer Diskominfo KIB C ke Biro Umum & Adm. Sekda sesuai BAST No 4032/PU.04.00 tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp3.766.292.451,-.
- 3. Rehabilitasi Bangunan Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta dari Dinas Citata sesuai dengan BAST No.1586/RR.01.02 Tgl.12 Juni 2024 sebesar Rp127.109.660,-.

9. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(5.591.006.038,-) dan Rp(7.238.447.935,-). Mutasi pada Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan tersebut terlampir pada tabel berikut.

Tabel 2.10 Mutasi akumulai penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan

Saldo per 31 Desember 2023	(5.591.006.038)
Penambahan	
Beban Penyusutan 2024	531.833.068
Koreksi Kurang Catat	1.115.608.829
Saldo per 31 Desember 2024	(7.238.447.935)

Sumber : Laporan Aset Sekretariat Daerah Semester II 2024, 2025

10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya berupa Peralatan dan Mesin pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(125.596.240,-) dan Rp(152.551.250,-).

Saldo per 31 Desember 2023	(125.596.240)
Penambahan	
Beban Penyusutan 2024	(26.955.010)
Saldo per 31 Desember 2024	(152.551.250)

Sumber : Laporan Aset Sekretariat Daerah Semester II 2024, 2025

2.1.3 Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada tahun 2024 perlu



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

ditetapkan rencana pembangunan daerah tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, Realisasi Capaian berdasarkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dalam Renstra kurun waktu 2020 – 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tabel 2.11 Target dan Realisasi Kinerja Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2020-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
FUNGSI PEMERINTAHAN									
	SASARAN STRATEGIS								
	1. Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Skor EKPPD	Skor	3,2	3,2374	3,25	3,6	3,3	4
	2. Meningkatnya kualitas tata kelola peraturan perundang-undangan dan deregulasi kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	N/A	N/A*	N/A	N/A	2	2
	3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase Kualitas	Persen	100	100			91	94,89
	4. Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian aksi program pembinaan dan pengembangan	Persen					94	95
	5. Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	Persen					100%	100%
	6. Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	Persen					100%	100%
	7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kerjasama yang terimplementasi	Persen					100%	100%
		Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	Persen					100%	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan.	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	Persen					100%	100%
	SASARAN KHUSUS								
	9. Menyelesaikan penegasan batas wilayah sesuai SE Kemendagri Nomor 903 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Prioritas	Persentase penyelesaian penegasan batas wilayah Kelurahan	Persen					100%	100%
	10. Tercapainya sasaran khusus	Persentase capaian rata-rata sasaran khusus	Persen					100%	100%
	11. Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persen					100%	100%
	12. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan keuangan daerah	Indeks					3	3
	13. Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Persen					100%	100%
	14. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Indeks					91	93,79
	15. Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	Persen					100%	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	16. Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	Persen					100%	100%
SASARAN OPERASIONAL									
	17. terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen			100	N/A	100	100
	18. Meningkatnya penyelesaian pengaduan Masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen			100	99,28	100	100
	19. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen			100	100	100	100
FUNGSI HUKUM									
SASARAN STRATEGIS									
	1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Peraturan Perundang-undangan dan Deregulasi Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks					2	3
	2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Nilai komponen area perubahan penataan perundang-undangan pada Indeks Reformasi Birokrasi	Skor			3,2	4	5	5
	3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen			91	89,08	91	90,38



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	4. Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase penyelesaian Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (KSD Nomor 17)	Persen					100%	100%
	5. Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase penyelesaian Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (KSD Nomor 22)	Persen					100%	100%
	6. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (KSD Nomor 29)	Persen					100%	100%
	7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39)	Persen			71,4	74	100%	100%
	8. Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45)	Persen					100%	100%
	9. Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Persentase penyelesaian Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (KSD Nomor 58)	Persen					100%	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	Persen					100%	100%
	11. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63)	Persen					100%	100%
	12. Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Harmonis dalam mendukung tata kelola pemerintahan	Nilai komponen penataan perundang- undangan pada Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	100	100	71,4	74	N/A	N/A
SASARAN KHUSUS									
	13. Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persen					100%	100%
	14. Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	Persen					100%	100%
	15. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	Indeks					3	3
	16. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Indeks					91	91
	17. Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik	Persen					100%	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.							
	18. Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	Persen					100%	100%
SASARAN OPERASIONAL									
	19. terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen			100	100	100%	100%
	20. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen			100	100	100%	100%
	21. Meningkatnya penyelesaian pengaduan Masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen			100	100	100%	100%
FUNGSI ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI									
SASARAN STRATEGIS									
	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78	N/A*	91	N/A*	2	3
	2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Nilai / Predikat AKIP	Skor					5	5



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen					91	90,38
	4. Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Persentase penyelesaian Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (KSD Nomor 12)	Persen					100%	100%
	5. Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD Nomor 20)	Persen					100%	100%
	6. Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase penyelesaian Pengurangan Sampah di Sumber (KSD Nomor 26)	Persen					100%	100%
	7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39)	Persen					100%	100%
	8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian Pengembangan Smart City (KSD Nomor 43)	Persen					100%	100%
	9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	Persen					100%	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN (KSD Nomor 62)	Persen					100%	100%
	11. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63)	Persen					100%	100%
SASARAN KHUSUS									
	12. Meningkatnya pemanfaatan e-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa	Persentase Pemanfaatan e-Order	Persen					100%	100%
	13. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	Persen					100%	100%
	14. Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi Rencana Strategis Komunikasi Publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Indeks					3	3
	15. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Indeks	86	86,34			91	91
SASARAN OPERASIONAL									
	16. terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen			100	100	100%	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	17. Meningkatnya penyelesaian pengaduan Masyarakat	Persentase progress penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen			100	100	100%	100%
	18. Terelesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen			100	100	100%	100%
FUNGSI KEPALA DAERAH									
SASARAN STRATEGIS									
	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah	Indeks	3,5	3,875	4	4	4	4
	2. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	90	90%			91	94%
	3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39)						100	100
	4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)						100	100
SASARAN KHUSUS									
	5. Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order						100	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	6. Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.						100	100%
	7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah						3	3
	8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021						91	92.74
	9. Persentase Pemakaian e-office	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi						100	100
	10. Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal						100	100
SASARAN OPERASIONAL									
	11. terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen			100	100	100	100%
	12. Meningkatnya penyelesaian pengaduan Masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen			100	97,93	100	100%
	13. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen			100	100	100	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
FUNGSI UMUM DAN ADMINISTRASI									
	SASARAN STRATEGIS								
	1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pimpinan dan Memfasilitasi PD/UPD, Deputi dan Asisten Deputi di Lingkungan Kompleks Perkantoran Balaikota dan Rumah Dinas	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan	Indeks	3,7	3,895	3,72	4	4	4
	2. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	100	100,00%			91%	98,42%
	3. Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berkualitas dan Integratif Nomor (12)						100%	100%
	4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)						100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)						100%	100%
	SASARAN KHUSUS								
5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini Laporan Keuangan							(3) WTP	(3) WTP



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	6. Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order						100%	97,36%
	7. Terimplementasinya Rencana Strategis Komunikasi Publik untuk 8. Program-Program Umum dan Unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta						100%	100%
	9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022						AA (91)	93,79
	10. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022						95	96,67
	11. Peningkatan Penggunaan e-office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses/terdisposisi						100%	100%
	12. Peningkatan Penggunaan e-Produk Hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal						100%	100%
SASARAN OPERASIONAL									
	13. terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen			100%	100%	100%	100%
	14. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen			100%	100%	100%	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	15. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen			100%	100%	100%	100%
FUNGSI PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN									
SASARAN STRATEGIS									
	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Skor EKPPD	Indeks	3,2	3,2374	4,00	4,00	3,3	3,3
	2. Meningkatnya kualitas tata kelola peraturan perundang-undangan dan deregulasi kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	Persen	100	100%			2	2
	3. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran						91%	91%
	4. Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan Lestari	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara (KSD 71)						100%	100%
	5. Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas DKI Jakarta (KSD 70)						100%	100%
	6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD 39)						100%	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD 61)						100%	100%
	SASARAN KHUSUS								
	7. Tercapainya sasaran khusus	Persentase capaian rata-rata sasaran khusus						100%	100%
	8. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan						3 (WTP)	3 (WTP)
	9. Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order						100%	100%
	10. Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.						100%	100%
	11. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022						AA (91)	AA (91)
	12. Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi						100%	100%
	13. Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal						100%	100%
	SASARAN OPERASIONAL								
	14. terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen			100%	100%	100%	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	15. Meningkatnya penyelesaian pengaduan Masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen			100%	100%	100%	100%
	16. terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen			100%	100%	100%	100%
FUNGSI KERJA SAMA DAERAH									
	SASARAN STRATEGIS								
	1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data	Skor EKPPD				3,25	N/A	3,3	N/A
	2. Meningkatnya kerja sama/kolaborasi yang sinergis dengan berbagai pihak	Persentase Kerja Sama yang terfasilitasi	Persen	100	100%			100%	100%
	3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran				91	91,05	91%	98,04%
	4. Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal Nomor (22)						100%	100%
	5. Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembngunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23)						100%	100%
	6. Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan						100%	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Pengembangan Kewirausahaan Terpadu nomor (20)							
	7. Terwujudnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan Lestari	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara Nomor (71)						100%	100%
	8. Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58)						100%	100%
	9. Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan Nomor (15)						100%	100%
	10. Persentase kerjasama dalam negeri yang terfasilitasi		Persen	100	100	100	100		
	11. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perjalanan Dinas		Indeks	3	4				
	12. Persentase kerjasama luar negeri yang terfasilitasi		Persen	100	100				



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	SASARAN KHUSUS								
	13. Terlaksananya kolaborasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah kolaborator						550	1008
	14. Terlaksananya JDCN Forum 2022	Jumlah Audience JDCN Forum 2022						5 juta	#####
	15. Terbitnya Rancangan Peraturan Gubernur terkait pelaksanaan Kerjasama di Pemprov DKI Jakarta dengan didukung terbitnya SOP Kerjasama	Persentase Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur terkait pelaksanaan kerjasama						100%	100%
	16. Tersedianya platform kolaborasi yang fleksibel dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi	Produk Hukum Platform Kolaborasi terbit						100%	100%
		Persentase Pembangunan Platform Kolaborasi						100%	100%
		Jumlah program kolaborasi baru di platform kolaborasi (Jakarta Development Collaboration Network)						100%	100%
	17. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan keuangan						(3) WTP	(3) WTP
	18. Meningkatnya pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase Pemanfaatan E-Order						100%	100%
	SASARAN OPERASIONAL								
19. terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen				100%	100%	100%	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	20. terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen			100%	100%	100%	100%
FUNGSI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP									
SASARAN STRATEGIS									
	1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Peraturan Perundang-undangan dan Deregulasi Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan				85	N/A	2	3
	2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Skor EKPPD				3,25	N/A	3,3	N/A
	3. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	100	83,15%	91	90,69	91	90,87
4. Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan Lestari		Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Nomor (72)				100	100	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan				100	100	100%	100%
		Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem							
		Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi Nomor (53)							



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara Nomor (71)						100%	100%
	5. Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58)						100%	100%
	6. Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasinya DKI Jakarta Nomor (70)						100%	100%
	7. Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional Nomor (10)						100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Nomor (28)						100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)						100%	100%
	8. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)						100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73)						100%	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)						100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nomor (41)						100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)						100%	100%
	10. Mewujudkan peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur terhadap rencana tata ruang	Persentase peningkatan upaya pengendalian pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup	Persen	60%	79%	N/A	N/A	N/A	N/A
	11. Mewujudkan peningkatan pemenuhan kewajiban SIPPT	Persentase peningkatan upaya pemenuhan pkewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah	Persen	15%	18%	N/A	N/A	N/A	N/A
	SASARAN KHUSUS								
	12. Tercapainya sasaran khusus	Persentase capaian rata-rata sasaran khusus						100	100%
	13. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan Keuangan						(3) WTP	(3) WTP
	14. Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order						100%	100%
	15. Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program- program	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan						100%	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	umum dan unggulan Perangkat Daerah	unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.							
	16. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022						AA (91)	AA (91)
	17. Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi						100%	100%
	18. Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal						100%	100%
SASARAN OPERASIONAL									
	19. terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen			100%	100%	100%	100%
	20. Meningkatnya penyelesaian pengaduan Masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen			100%	100%	100%	100%
	21. Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen			100%	97%	100%	100%
FUNGSI KESEJAHTERAAN SOSIAL									
SASARAN STRATEGIS									
	1. Meningkatnya kualitas tata kelola peraturan perundang-undangan dan deregulasi kebijakan.	Indeks Kualitas Kebijakan				85%	N/A	2	2
	2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan	Skor EKPPD	Indeks	3,2	3,2	3,25	N/A	3,3	N/A



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Daerah yang transparan dan akuntable								
	3. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	100	100,00%	91	94,85	91%	92%
	4. Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Persentase penyelesaian rencana aksi pengentasan kemiskinan Melalui Integrasi Bantuan Sosial Nomor (42)						100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan Kesejahteraan Lansia melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Nomor (11)						100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berkualitas dan integratif Nomor (12)						100%	100%
	5. Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	Persentase penyelesaian rencana aksi perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Nomor (13)						100%	100%
	6. Terwujudnya Jakarta sebagai Kota Tujuan Wisata yang berdaya saing Internasional	Presentasi Penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata Destinasi DKI Jakarta Nomor (70)						100%	100%
	7. Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi, mandiri dan berkelanjutan,	Persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan Aksesibilitas penyandang Disabilitas Nomor (14)						100%	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	berikut sarana prasarana pendukungnya	Presentase Penyelesaian rencana aksi pembangunan Stadion Olahraga bertaraf Internasional Nomor (10)						100%	100%
	8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencna aksi mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)						100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)						100%	100%
SASARAN KHUSUS									
	9. Tercapainya sasaran khusus	Persentase capaian rata-rata sasaran khusus				100	100	100%	100%
	10. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini Laporan Keuangan						3 (WTP)	3 (WTP)
	11. Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order						100%	100%
	12. Terimplementasinya Rencana Strategi Komunikasi Publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Presentasi Implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta						100%	100%
	13. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022						AA(91)	91%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	14. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang / Jasa Melalui Swakelola tipe III/IV						N/A	N/A
	15. Peningkatan Penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi						100%	100%
	16. Peningkatan penggunaan e-Produk Hukum	Jumlah Perbal / Produk Hukum yang di buat melalui sistem e-perbal						100%	100%
SASARAN OPERASIONAL									
	17. Tereleaksikannya tindak lanjut arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur	Persen	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
	18. Meningkatnya penyelesaian pengaduan Masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
	19. Tereleaksikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
FUNGSI PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL									
SASARAN STRATEGIS									
	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Skor EKPPD	Indeks	3,2	3,2	3,3	N/A	3,3	N/A
	2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	100	91,19	91	91,08	91	90.37



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	model organisasi pemerintahan yang dinamis								
	3. Meningkatnya kualitas tata kelola peraturan perundang-undangan dan deregulasi kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan		N/A	N/A			2	
	4. Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Persentase penyelesaian rencana aksi Perluasan Akses Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) (nomor 1)				85	N/A	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi (nomor 3)						100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan (nomor 5)						100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Perluasan Akses Pendidikan Tinggi melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) (nomor 6)						100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peningkatan						100%	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Kesejahteraan Guru PAUD (nomor 8)							
		Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (nomor 12)						100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Sekolah Kolaborasi (nomor 37)						100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Binar Membaca (nomor 69)						100%	100%
	5. Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (KSD Nomor 14)						100%	100%
	6. Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Pariwisata dan Budaya melalui Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (nomor 19)						100%	100%
		Persentase penyelesaian Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas DKI Jakarta (KSD Nomor 70)						100%	100%
	7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)						100%	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah (nomor 61)						100%	100%
	SASARAN KHUSUS								
	8. Tercapainya sasaran khusus	Persentase capaian rata-rata sasaran khusus						100%	100%
	9. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan						3	3
	10. Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.						100%	100%
	11. Tersedianya Platform Kolaborasi yang fleksibel dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi	Jumlah kolaborator Jakarta						20	
	12. Terwujudnya kepuasan Layanan mental spiritual	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan mental spritual						85	
	13. terselesaikannya dan terpublikasikannya penyaluran belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan/ keagamaan dan tempat ibadah di Provinsi DKI Jakarta	Jumlah organisasi kemasyarakatan /keagamaan dan tempat ibadah penerima belanja hibah						4	4
	14. Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order						100%	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	15. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022						91	
	16. Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal						100%	
	17. Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi						100%	
	SASARAN OPERASIONAL								
	18. Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen			100%	100%	100%	100%
	19. Meningkatnya penyelesaian pengaduan Masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen			100%	100%	100%	100%
	20. terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen			100%	100%	100%	100%



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Sepanjang tahun 2020 hingga 2022 target-target yang dibebankan secara umum dapat diselesaikan sesuai target awal tahun oleh biro-biro dibawah setda, namun memang terdapat beberapa target yang belum terpenuhi yang dijadikan bahan evaluasi untuk tahun mendatang, selain itu penilaian skor EKPPD dalam tahun mendatang dapat dievaluasi lagi sehingga keluarnya penilaian dapat dipercepat agar tidak menjadi hambatan bagi tiap biro dalam melakukan evaluasi kinerja di tahun berjalan.

Target kinerja yang dibebankan kepada perangkat daerah mengalami beberapa kali perubahan dari tahun 2020 hingga 2022, sementara dari tahun 2023 hingga 2024 target yang dibebankan telah disederhanakan dan tidak mengalami perubahan yang signifikan sehingga disajikan terpisah dari target tahun sebelumnya terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12 Target dan Realisasi Kinerja Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ sasaran	Satuan	2023 Target	2023 Realisasi	2024 Target	2024 Realisasi	Target 2025	Target 2026
PENINGKATAN DUKUNGAN TEKNIS, ADMINISTRASI, DAN ANALISIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
	SASARAN STRATEGIS								
	1. Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Nilai	36,9	37	37,8	37,29	39,15	40,73
	2. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	Skor	4,047	3,67	4,128	N/A	4,211	4.295
	3. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Indeks	2	1	2,3	N/A	2,5	2,8
	4. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	Persen	92	N/A*	93	N/A	94	95
	5. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	Persen	100	100	100	100	100%	100%
	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	Persen	80	100	100	100	100%	100%
	7. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi	Persentase Kerjasama yang terimplementasi	Persen	50	100	100	100	100%	100%



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ sasaran	Satuan	2023		2024		Target 2025	Target 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah	Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	Persen	50	100	100	100	100%	100%
SASARAN KHUSUS									
	1. Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3	3	3,25	3,25	3,5	3,75
	2. Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persen	100	100	100	100	100	100
	3. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persen	100	100	80	terlampir	90	100
	4. Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 jam Pelajaran pertahun	Persentase implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Persen	82	89,95	100	100	100	100
	5. Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persen	100	100	100	100	100	100
	6. Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100	100	100	100	100	100
	7. Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	Persen	71	71	71	71	71	71
	8. Terlaksananya kegiatan lembaga dan Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung program	Jumlah laporan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung	Dokumen	4	4	4	4	4	4



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ sasaran	Satuan	2023		2024		Target 2025	Target 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta							
SASARAN OPERASIONAL									
	1. Terelesakannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100	100	100	100
	2. Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100
	3. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100	100	100	100

*) Disepakati tidak ada penilaian (N/A) terkait dengan perubahan aturan evaluasi mandiri

Sumber: LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024

Dari tabel diatas dilihat bahwa secara keseluruhan sekretariat daerah provinsi DKI jakarta telah memenuhi target-target yang ditetapkan pada awal tahun , namun masih terdapat beberapa indikator yang masih dapat diperbaiki untuk tahun-tahun mendatang seperti indeks, perubahan aturan evaluasi mandiri.



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tabel 2.13 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	917.995.403.149	880.103.967.791	95,87%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	623.232.873.739	605.562.643.659	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	623.171.967.238	605.505.422.459
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.906.501	57.221.200
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	374.242.967	350.037.288	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	374.242.967	350.037.288
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.775.963.854	22.594.011.526	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.315.295.786	8.165.861.697
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.144.552.726	3.783.866.853
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	332.563.194	264.847.500
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.400.079.037	3.272.306.345
							Penyediaan Barang	568.429.526	537.438.849



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
							Cetakan dan Penggandaan		
							Penyediaan Bahan/Material	1.889.655.056	1.888.749.217
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.793.433.488	1.772.920.000
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.234.355.358	2.812.277.065
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.750.000	3.750.000
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	93.849.683	91.994.000
					31.446.677.717	29.724.187.412	Pengadaan Mebel	10.013.881.315	9.166.013.714



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Sebagaimana dicantumkan pada tabel diatas, kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh beberapa program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Merupakan Program dengan Kategori Program yaitu Program Perangkat Daerah untuk peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai. Pada tahun 2024, program ini memiliki anggaran sebesar Rp.917.995.403.149,- dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp.880.103.967.791,-, sehingga program tersebut berhasil direalisasikan sebesar 98,87%. Program ini diampu oleh semua Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

2. Program Penataan Organisasi

Merupakan program yang diampu oleh 2 Biro, yaitu:

1. Biro Organisasi dan Reformasi

Pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, kategori program ini termasuk kedalam Program Prioritas dengan Strategi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp.1.078.192.740,- berhasil direalisasikan sebesar Rp.1.075.080.000,- sehingga capaian atas program tersebut adalah sebesar 99,71%. Program ini mendukung sasaran:

- 1) Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dengan indikator Skor EKPPD
- 2) Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis dengan indikator Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta

2. Biro Kerjasama Daerah.

Pada Biro Kerjasama Daerah, kategori program ini termasuk kedalam Program Perangkat Daerah dengan Strategi Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp.33.095.998.833,- berhasil direalisasikan sebesar Rp.28.469.243.372,- sehingga capaian atas program tersebut adalah sebesar 86,02%.. Program ini mendukung sasaran Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama DaerahProgram Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Kategori program ini termasuk kedalam Program Prioritas dengan Strategi Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan Peraturan Perundang- undangan dan Advokasi Hukum Provinsi DKI Jakarta. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp.2.361.091.463,- berhasil direalisasikan sebesar Rp.2.264.376.219,- sehingga capaian atas program tersebut adalah sebesar 95,90%. Program ini hanya diampu oleh Biro Hukum dan mendukung capaian kinerja atas sasaran Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah.



3. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program yang diampu oleh Biro Pemerintahan dan Biro Kerjasama Daerah ini memiliki anggaran sebesar Rp.81.752.409.742,- berhasil direalisasikan sebesar Rp.81.680.048.868,- sehingga capaian atas program tersebut adalah sebesar 99,91%. Kategori Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah termasuk kedalam Program Perangkat Daerah dengan Strategi Fasilitasi Kerjasama Daerah Melalui Fasilitasi Sinergi dengan Pemerintah Pusat, Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama Luar Negeri, serta Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Program ini mendukung capaian atas 2 sasaran, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah
- 2) Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan

4. Program Kesejahteraan Rakyat

Program Kesejahteraan Rakyat diampu oleh 2 Biro, yaitu Biro Kesejahteraan Sosial serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp.350.505.480.298,- dengan realisasi sebesar Rp.344.753.042.345 sehingga capaian atas realisasi anggaran program tersebut bernilai 98,36%. Kategori program ini termasuk kedalam Program Perangkat Daerah dengan Strategi Penguatan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Program ini tidak mendukung capaian Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah. Program Perekonomian dan Pembangunan

Kategori program ini termasuk kedalam Program Prioritas dengan Strategi Persentase Kebijakan sesuai dengan peraturan. Program ini hanya diampu oleh Biro Perekonomian dan Keuangan, memiliki anggaran sebesar Rp.145.136.400, realisasi anggaran sebesar Rp.145.136.400,- sehingga capaiannya sebesar 100%. Anggaran ini tidak mendukung capaian Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

5. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Kategori program ini termasuk kedalam Program Perangkat Daerah dengan Strategi Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp.212.644.196,- berhasil direalisasikan sebesar Rp.200.230.000,- sehingga capaian atas program tersebut adalah sebesar 94,16%. Program ini tidak mendukung capaian Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah dan diampu oleh 2 Biro, yaitu:

- 1) Biro Perekonomian dan Keuangan
- 2) Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup



2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kelompok sasaran layanan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik unit. Kelompok sasaran ini mencakup berbagai lapisan sosial dengan tujuan memastikan akses yang merata terhadap layanan perangkat daerah yaitu:

- 1) Masyarakat umum;
- 2) Para karyawan di lingkungan sekretaris daerah provinsi DKI Jakarta.

Penetapan kelompok sasaran layanan bertujuan untuk memastikan keadilan serta dukungan terhadap pembangunan kota yang inklusif dapat berjalan dengan optimal. Sekretaris daerah provinsi ini diharapkan menjadi pendukung suksesnya program kerja gubernur dan pemerintah untuk menciptakan kota yang lebih nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah

2.2.1 Reviu Dokumen Perencanaan

2.2.1.1 Arahan Kebijakan dan Rencana Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

Penyusunan renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta berpedoman kepada beberapa arahan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan dan rencana pembangunan nasional maupun Provinsi DKI Jakarta yang menjadi pedoman adalah:

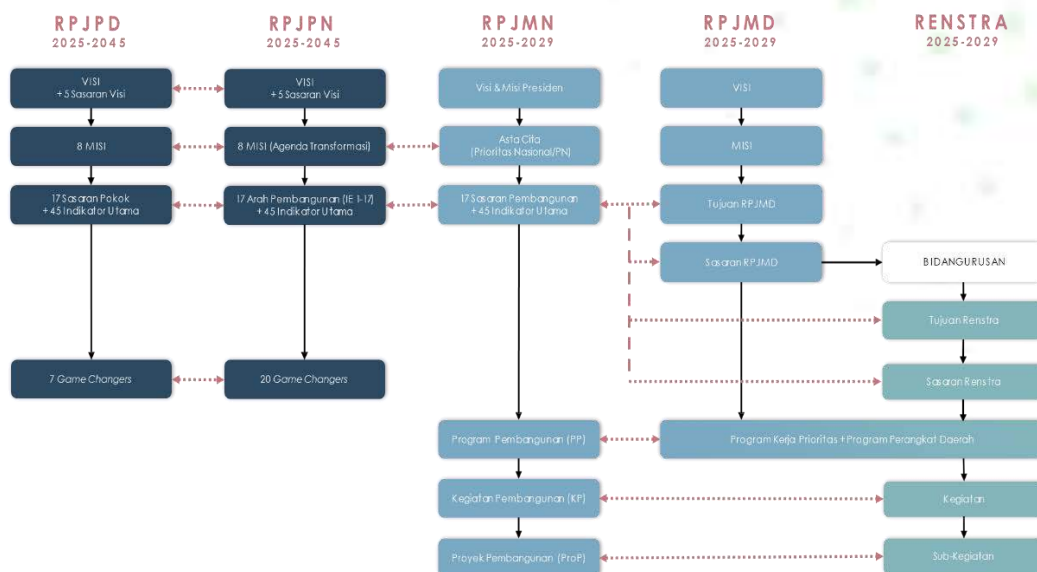
1. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Hubungan antar dokumen kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan provinsi terhadap renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut.



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Gambar 2.5 Hubungan antar dokumen kebijakan dan rencana pembangunan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045 menjadi dasar hukum perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. RPJPN menetapkan visi Indonesia Emas 2045 yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) sasaran visi; 8 (delapan) misi agenda pembangunan terbagi atas 3 (tiga) misi agenda transformasi, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi; 17 (tujuh belas) arah tujuan pembangunan; serta 45 indikator utama pembangunan. Visi Indonesia Emas 2045 adalah **NKRI yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Sasaran utama dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah (1) pendapatan per kapita setara dengan negara maju; (2) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; (4) daya saing sumber daya manusia meningkat; dan (5) intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*. Tahapan pertama Visi Indonesia Emas 2045 tahun 2025-2029 difokuskan untuk penguatan transformasi, seperti penuntasan pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,6-6,1% per tahun, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, **peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi**, mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok pendapatan, serta kelompok rentan, dll.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045

RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum tahun 2024, memuat (a) strategi pembangunan nasional, (b) kebijakan umum, (c) program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta (d) kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif menjadi dasar hukum perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun sejak tahun 2045-2045. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu *Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*, terdiri atas 8 Asta Cita/8 prioritas nasional, 17



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

program prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Relevansi Visi Presiden periode 2025-2029 dalam renstra perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 berada dalam **Asta Cita 7** *Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*, yaitu:

- a. *Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani*, dengan indikator yang relevan (i) peningkatan indeks reformasi birokrasi nasional, (ii) peningkatan indeks pelayanan publik, (iii) peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- b. *Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*, dengan indikator yang relevan terkendalnya tingkat inflasi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 - 2045

RPJP Provinsi DKI Jakarta 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun disusun dengan mempedomani RPJP Nasional 2025-2045. RPJPD Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah *Jakarta Kota Global yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan*, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. **Jakarta Maju:** Jakarta kota modern, inovatif, responsif, dan progresif, dengan semangat terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Jakarta adalah kota berbasis pengetahuan dan teknologi sebagai pusat peradaban nasional yang terhubung dengan dunia internasional. Pemanfaatan pengetahuan dan inovasi pada seluruh elemen pembangunan wilayah, pembangunan infrastruktur modern yang berkualitas dan adaptif, penyediaan layanan dan jasa yang terdepan, regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang transparan, responsif, dan efektif terhadap kebutuhan aktivitas perkotaan, serta penduduk yang sejahtera, setara, dan berkebudayaan maju.
- b. **Jakarta Berdaya Saing:** kota yang kompetitif dan memiliki semangat menjadi sebuah kota yang unggul di kancah nasional maupun global, untuk dapat menarik sumber daya finansial, manusia, barang, serta informasi dan pengetahuan seluas-luasnya dengan memaksimalkan keunggulan komparatif, kompetitif, dan kolaboratif. Jakarta memaksimalkan potensi sumber daya dan keunikan yang dimiliki serta memperkuat dan memperluas kolaborasi dengan berbagai elemen pembangunan untuk meningkatkan citra dan pengaruh dalam global. Jakarta dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkeahlian tinggi, ekonomi yang berketahanan, produktif dan berdaya saing global, infrastruktur yang andal dan mumpuni, interaksi budaya yang mendunia, serta memiliki peran dan pengaruh diplomasi yang kuat dalam pergaulan kota-kota dunia.
- c. **Jakarta Berkelanjutan:** Jakarta mengutamakan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jakarta memiliki kualitas lingkungan hidup yang baik, nyaman, dan lestari serta menghadapi



berbagai risiko dan ancaman perubahan iklim, bencana alam, maupun non alam, meminimalisasi produksi emisi gas rumah kaca, serta memiliki ketahanan air, energi, dan pangan. Jakarta didukung oleh sistem pembangunan adaptif dan berketahanan, infrastruktur yang kokoh, andal, dan selaras dengan kondisi lingkungan yang lestari.

Visi jangka panjang Jakarta untuk periode 2025-2045 dijabarkan kedalam beberapa misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia jakarta yang unggul, produktif, dan sejahtera

Pembangunan sumber daya manusia menjadi sangat penting karena manusia sebagai aktor memiliki peran dalam upaya pemecahan masalah, inovasi, dan penggerak produktivitas. Jakarta memiliki sumber daya manusia yang unggul dari segi kualitas keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi sehingga mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan sesuai tuntutan global yang kompleks.

Sumber daya manusia Jakarta yang produktif mampu menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas secara efisien melalui inovasi dan kreativitas.

2. Mewujudkan pembangunan wilayah Jakarta yang merata dan berkeadilan

Pemerataan pembangunan dilakukan tidak hanya dari segi fisik/infrastruktur tetapi juga dari segi ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan. Terciptanya sumber daya yang unggul dan produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tata kelola yang efisien, lingkungan perkotaan yang aman, serta penduduk yang sejahtera, dan berkebudayaan maju.

3. Mewujudkan ekonomi Jakarta yang inklusif, berdaya saing global, dan berkelanjutan

Pembangunan ekonomi memiliki peran yang sangat esensial dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Saat ini Jakarta telah menjadi pusat perekonomian dan bisnis Indonesia, serta menjadi kontributor dengan proporsi terbesar dalam PDB nasional. Jakarta menjadi kota yang memiliki daya saing tinggi di kancah global dan memiliki keselarasan dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ekonomi Jakarta menduduki posisi yang setara dengan kota-kota global lainnya di negara maju, sumber daya ekonomi yang kompetitif, serta berperan yang strategis dalam berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis di tingkat regional dan global.

4. Mewujudkan regulasi dan tata kelola pelayanan publik Jakarta yang berkualitas, harmonis, adaptif, dan berintegritas

Jakarta mengalami berbagai transformasi dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Pemerintah harus berperan sebagai katalis dalam mengakomodasi peluang-peluang pertumbuhan ekonomi masa depan. Perencanaan regulasi dan sistem tata kelola sejalan dengan cita-cita pembangunan yang inklusif, inovatif, dan mutakhir. Pengembangan kapasitas dan integritas aparat pemerintahan untuk menurunkan tingkat korupsi, perencanaan dan perancangan regulasi yang adaptif dan inovatif terhadap tren global, serta peningkatan responsivitas pemerintahan dalam mendukung keberlanjutan pemberdayaan masyarakat.



5. Mewujudkan stabilitas Jakarta yang tangguh dan berpengaruh di kancah global

Jakarta menjadi kota yang stabil dan kokoh di dalam lingkup internal dan secara eksternal memiliki pengaruh dalam lingkup nasional dan global. Terciptanya lingkungan Jakarta yang aman, tangguh dan mampu menjaga kondusivitas internal dalam menghadapi potensi krisis yang akan terjadi di masa depan, serta memiliki kemampuan diplomasi dan kerja sama dalam lingkup pergaulan global. Penciptaan lingkungan yang aman dan terkendali, perwujudan masyarakat yang demokratis dan partisipatif, kestabilan ekonomi makro, serta kemampuan berdiplomasi dan berkolaborasi yang tangguh, baik di kancah nasional maupun global.

6. Mewujudkan infrastruktur Jakarta yang berkualitas dan ramah lingkungan

Pembangunan infrastruktur yang merata dan menekan kesenjangan di seluruh wilayah Jakarta. Infrastruktur yang andal dan modern bagi loncatan pembangunan Jakarta yang lebih maju. Infrastruktur berkualitas yang mampu mewadahi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Akses setara terhadap infrastruktur untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap pembangunan infrastruktur menghormati kelestarian alam serta mampu bertahan terhadap ancaman perubahan iklim ataupun bencana alam/non alam.

7. Mewujudkan pembangunan Jakarta yang sinergis dan berkesinambungan

Memastikan rencana pembangunan dan implementasinya terus sinergis dari suatu periode ke periode selanjutnya. Sinergi antara pembiayaan dan pembangunan daerah yang juga mencakup penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan serta perencanaan anggaran pembangunan.

8. Mewujudkan Jakarta yang layak huni melalui ketahanan sosial budaya dan ekologis

Tersedianya pemenuhan hak kebebasan beragama serta penguatan pemberdayaan dan partisipasi perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga yang setara. Terjaganya keseimbangan alam melalui aksi pengurangan dampak perubahan iklim serta peningkatan lingkungan yang adaptif dengan upaya keberlanjutan melalui energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan.

Tahapan implementasi visi dan misi RPJPD Provinsi Daerah Khusus Jakarta akan dilaksanakan dalam 4 (empat) yaitu (a) **Tahap Pertama periode 2025-2029** dengan dititikberatkan pada **perbaikan fundamental (*readiness and foundation building*)** untuk pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi; (b) **Tahap Kedua periode 2030-2034** dengan dititikberatkan pada **transformasi ekosistem global (*innovative and inclusive growth*)** untuk penguatan landasan sosial dan lingkungan serta akselerasi ekonomi menuju ekosistem kota global yang kompetitif; (c) **Tahap Ketiga periode 2035-2039** dengan dititikberatkan pada **ekspansi global (*sustainable transformation*)** untuk penguatan eksistensi dan akselerasi daya saing ekonomi dalam skala regional dan internasional; (d) **Tahap Keempat periode 2040-2045** dengan dititikberatkan pada **perwujudan kota global (*elevated regional and global leadership*)** untuk perwujudan Jakarta Kota Global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Gambar 3.3



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

menjabarkan implementasi tahapan visi jangka panjang Jakarta dengan beberapa indikator kunci sasaran dalam rangka mencapai visi jangka panjang Jakarta 2045.

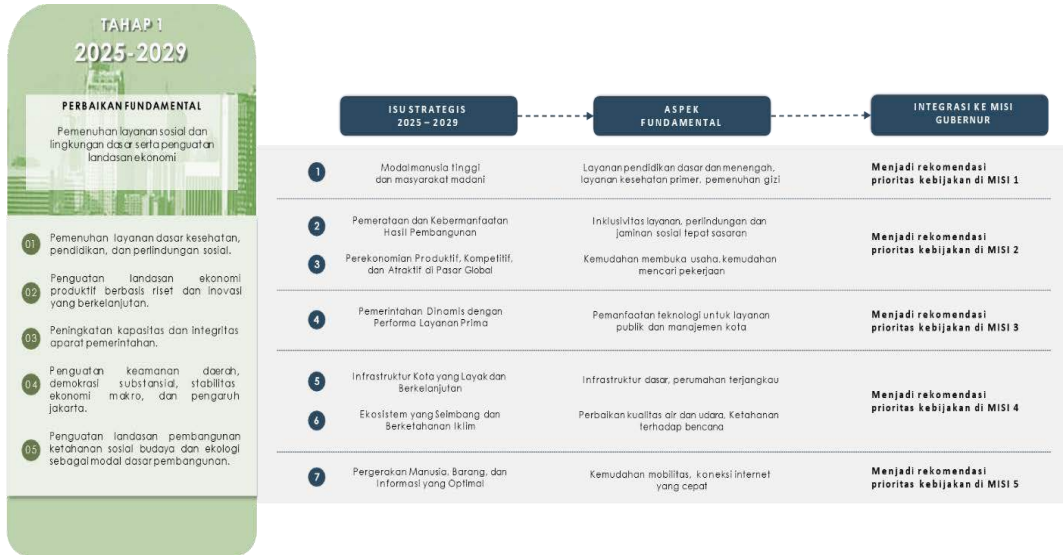
Gambar 2.6 Tahapan Implementasi Visi Jakarta 2025-2045



Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Tahap Pertama RPJPD Provinsi Daerah Khusus Jakarta periode 2025-2029 akan diwujudkan dalam RPJMD Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025-2029 dan renstra perangkat daerah. Isu strategis terdapat 7 (tujuh) dan akan menjadi rekomendasi untuk diintegrasikan dalam misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta periode 2025-2029 selanjutnya dalam program dan kegiatan perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Gambar 2.7 Tahap Pertama Implementasi Visi Jakarta Periode 2025-2029



Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Relevansi visi jangka panjang Jakarta 2045 terhadap tugas dan fungsi serta program dan kegiatan perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan renstra 2025-2029 terdapat dalam Misi 4 Mewujudkan regulasi dan tata kelola pelayanan publik Jakarta yang



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

berkualitas, harmonis, adaptif, dan berintegritas dan **Misi 5 Mewujudkan stabilitas Jakarta yang tangguh dan berpengaruh di kancah global.** Misi 4 dan Misi 5 bertujuan untuk mengatasi **isu strategis nomor 4 Pemerintahan Dinamis dengan Performa Layanan Prima**, kemudian selanjutnya dijabarkan dalam program, kegiatan, anggaran, serta indikator kinerja perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 - 2029

RPJM Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025-2029 adalah visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025-2029 dari hasil pemilihan umum yang telah ditetapkan dan dilantik yaitu Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. dan H. Rano Karno, S.I.P.

Visi yang akan dicapai di akhir 2029 adalah ***Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya.*** Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat megapolitan yang berdaya dan sejahtera

Tujuannya adalah tercapainya pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat megapolitan. Sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Meningkatnya kualitas dan kesempatan pendidikan untuk semua.
- b. Membaiknya kualitas kesehatan masyarakat perkotaan.
- c. Meningkatnya kontribusi generasi muda dan distribusi manfaat pembangunan tanpa kesenjangan gender.
- d. Menguatnya Nilai budaya, demokrasi, dan kebhinekaan masyarakat.

2. Mewujudkan pusat ekonomi inovatif dengan pembangunan dan akses sumber daya yang merata

Tujuannya adalah (a) terbangunnya pusat ekonomi dan bisnis yang kompetitif dan inovatif dan (b) tercapainya inklusifitas sumber daya pembangunan dan penghidupan yang layak. Sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Tumbuhnya sektor usaha produktif dan bernilai tambah tinggi dengan prinsip ekonomi berkelanjutan.
- b. Menguatnya inovasi, kolaborasi, dan daya saing kota.
- c. Hadirnya kota destinasi dunia dengan ragam amenitas dan aktivitas yang menarik.
- d. Meningkatnya kesempatan kerja layak dan resiliensi tenaga kerja.
- e. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial.

3. Mewujudkan manajemen kota modern yang akuntabel dan responsif untuk layanan publik yang optimal

Tujuannya adalah tercapainya reformasi manajemen dan layanan kota modern. Sasaran yang akan dicapai adalah:



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- a. Optimalnya manajemen, akuntabilitas keuangan, dan performa kinerja pemerintah.
 - b. Berkembangnya kapasitas dan integritas kerja aparatur.
 - c. Terakselerasinya transformasi digital dan layanan kota berbasis teknologi.
 - d. Meningkatnya kemudahan dan kualitas layanan masyarakat.
- 4. Mewujudkan ruang kota layak huni, berketahanan, dan berkelanjutan**
Tujuannya adalah (a) terbangunnya infrastruktur kota layak huni dan (b) tercapainya ekosistem kota layak huni. Sasaran yang akan dicapai adalah:
- a. Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi yang berkualitas dan berkelanjutan.
 - b. Tersedianya hunian terjangkau dan permukiman layak.
 - c. Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.
 - d. Meningkatnya kapasitas ketahanan kota terhadap bencana dan perubahan iklim.
- 5. Mewujudkan konektifitas dan sinergi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya**
Tujuannya adalah terwujudnya mobilitas dan aktifitas masyarakat perkotaan berbasis transit. Sasaran yang akan dicapai adalah:
- a. Optimalnya layanan transportasi umum dan sistem mobilitas terintegrasi.
 - b. Meningkatnya performa kawasan strategis dan kawasan kompak mandiri berorientasi transit.

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025-2029 memiliki 10 Program Kerja untuk mencapai visi dan misi serta Jakarta yang lebih baik di akhir 2029 yaitu:

1. **Jakarta Belajar:** wajib belajar 12 tahun, peningkatan daya tampung sekolah, beasiswa KJP KJM, penghasilan guru sesuai UMP, pelatihan tenaga pendidik bagi penyandang disabilitas, dan beasiswa S2 S3 bagi guru dan dosen.
2. **Jakarta Bergerak:** peningkatan layanan dan akses MRT, LRT, TransJakarta, Mikrotrans Jaklingko, TransJakarta laut untuk Kepulauan Seribu, tidak ada perubahan tarif transportasi publik, bus sekolah.
3. **Jakarta Bekerja:** sentralisasi info loker, pelatihan bersertifikat dan jobfair di tiap kecamatan, pemberdayaan masyarakat putus sekolah, penyediaan daycare untuk anak, fleksibilitas jam dan lokasi kerja untuk mengurai kecamatan.
4. **Jakarta Bugar Produktif:** peningkatan layanan BPJS, perbaikan layanan kesehatan, RSUD berkualitas, RS Apung Kepulauan Seribu, Hotline Kesehatan 24 Jam, layanan pengembangan diri dan ketahanan mental.
5. **Jakarta Berkeadilan:** kepastian tempat tinggal, pengembalian hak masyarakat, pemberdayaan rakyat miskin kota, meningkatkan akses pelayanan publik untuk disabilitas dan lansia.
6. **Jakarta Berdedikasi:** penguatan kapasitas RT RW dengan peningkatan insentif, optimalisasi kinerja pemanfaatan aplikasi Alpukat Betawi, CCTV



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

24 jam di tiap RT, bebas PBB untuk hunian di bawah Rp 2 Miliar, balai rakyat di tiap kelurahan, Jakarta Collaboration Fund.

7. **Jakarta Berolahraga Berbudaya:** JIS menjadi homebase Persija, lapangan sepakbola dispore sesuai standar FIFA, revitalisasi GOR dan RPTRA, penguatan sentra kebudayaan Betawi, Jakarta Creative Hub, Dana Abadi Kebudayaan.
8. **Jakarta Berseri:** peningkatan sumur resapan dan tim PPSU, pembangunan waduk, tanggul, kolam retensi, kerja sama lintas instansi untuk mengatasi polusi udara, layanan air bersih 100%, peningkatan ruang terbuka, roof garden dan taman vegetasi, jakarta siaga api untuk pencegahan kebakaran.
9. **Jakarta Bermukim:** TOD, penyediaan hunian dan kantong parkir terintegrasi dengan transportasi publik, ketersediaan hunian vertikal yang terjangkau.
10. **Jakarta Berwisata:** tata kelola wisata Kepulauan Seribu, revitalisasi pantai Marunda untuk wisata gratis, peningkatan sarana wisata museum, kawasan terpadu Teluk Jakarta sebagai *water front city modern*, kawasan wisata RTH, kampanye wisata Jakarta from North to South.

Relevansi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 terhadap tugas dan fungsi serta program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan renstra adalah Misi 3 yaitu *Mewujudkan manajemen kota modern yang akuntabel dan responsif untuk layanan publik yang optimal dengan tujuan tercapainya reformasi manajemen dan layanan kota modern*, dengan **sasaran** yang akan dicapai adalah *meningkatnya kemudahan dan kualitas layanan masyarakat*.

2.2.1.2 Arahan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024-2044 mengamanatkan pembangunannya untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai Kota Bisnis Berskala Global yang Berkeadilan, Berketahanan, serta Berbasis Transit dan Digital dijabarkan ke dalam misi pembangunan yaitu (a) meningkatkan produktivitas kota melalui perwujudan ruang dan pelayanan kota yang adaptif dan inklusif dan (b) mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan tupoksi, Setda tidak membuat kebijakan teknis terkait tata ruang tetapi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dan fasilitasi untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang sesuai tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Fasilitasi dan koordinasi implementasi RTRW agar kebijakan dalam RTRW sejalan dengan kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi termasuk perumusan peraturan gubernur untuk mendukung iklim investasi sesuai RTRW;
2. Fasilitasi penyebaran informasi dan sosialisasi RTRW dan memastikan kemudahan perizinan di kawasan-kawasan strategis yang ditetapkan RTRW;



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

3. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan program-program strategis lintas dinas yang diamanatkan dalam RTRW;
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi RTRW pada seluruh perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta.

2.2.1.3 Buku Peta Jalan Jakarta Menuju 20 Besar Kota Global Dunia

Visi Jakarta untuk menjadi salah satu dari 20 kota global teratas pada tahun 2045 dipandu oleh North Star: bertransformasi menjadi kota global yang progresif, adil, kompetitif, dan berkelanjutan, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Ambisi ini mencerminkan signifikansi ekonomi, budaya, dan geopolitik dari kota Jakarta sekaligus menjawab tantangan perkotaan yang kritis seperti kemacetan, kesenjangan antarwilayah, dan infrastruktur yang sudah usang. Inti dari transformasi ini adalah rencana induk dan tata ruang kota Jakarta, yang bertujuan untuk mengubah struktur monosentris menjadi model polisentris dengan berbagai pusat ekonomi.

Menetapkan visi dan misi Jakarta adalah langkah awal yang krusial untuk mencapai tujuan Jakarta untuk menjadi salah satu dari 20 kota global terbaik. Global Cities Index (GCI) dari Kearney, yang diluncurkan pada tahun 2008, menyediakan ukuran komprehensif mengenai dampak dan pengaruh global suatu kota dengan mengevaluasi kemampuannya dalam menarik modal, talenta, dan ide atau inovasi. GCI menilai **kota-kota global berdasarkan lima dimensi utama: Aktivitas Bisnis, Sumber Daya Manusia, Pertukaran Informasi, Pengalaman Budaya, dan Keterlibatan Politik**. Penilaian ini memberikan wawasan mengenai daya saing dan posisi global suatu kota. Bagi Jakarta, yang bercita-cita meningkatkan peringkatnya secara global, GCI dapat menjadi alat ukur penting untuk mengidentifikasi keunggulan yang di punyai kota Jakarta serta area yang perlu diperbaiki.

Untuk mencapai target masuk dalam 20 kota besar dunia pada tahun 2045, Jakarta perlu menjembatani kesenjangan yang ada dan fokus pada delapan prioritas utama berikut:

- 1) Pertumbuhan kota yang dinamis, tangguh, dan berkelanjutan
- 2) Ekonomi yang terdiversifikasi, kuat, dan inklusif
- 3) Masyarakat & tenaga kerja yang diberdayakan
- 4) Destinasi budaya & kreatif yang terkenal
- 5) Ramah lingkungan & tahan iklim
- 6) Infrastruktur dan konektivitas kelas dunia
- 7) Pusat Litbang dan Inovasi
- 8) Tata kelola yang gesit dan adaptif

Transformasi Jakarta menjadi kota global pada tahun 2045 akan dilakukan secara bertahap dan dipandu oleh kerangka kerja #RISE dalam empat fase strategis: Readiness & Foundation Building/ Kesiapan & Pembangunan Fondasi (2025-2029), Innovative & Inclusive Growth/ Pertumbuhan Inovatif dan Inklusif (2030-2034), Sustainable Transformation/



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Transformasi Berkelanjutan (2035-2039), dan Elevated Regional & Global Leadership/ Peningkatan Kepemimpinan Regional dan Global (2040-2045).

Transformasi jangka panjang Jakarta direncanakan secara strategis dalam empat fase utama, dimulai dengan fase "*Readiness & Foundational Development*" pada tahun 2025-2029, yang fokus pada pembangunan infrastruktur, kebijakan, dan peraturan penting untuk membuka potensi yang selama ini belum tergali. Lima tahun ke depan sangat krusial untuk membangun momentum yang tepat, karena kemajuan awal akan menentukan kesuksesan jangka panjang kota ini. **Tahun 2025 – 2029 ini akan berfokus pada mengurangi dan menghapus hambatan fundamental Jakarta, memastikan pendanaan dan investasi yang memadai, serta mengatasi kesenjangan keterampilan untuk mempercepat pertumbuhan di masa depan.**

Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta adalah perangkat daerah yang bertugas memastikan seluruh birokrasi di DKI Jakarta bergerak secara terkoordinasi dan efektif untuk menjalankan arahan tersebut. Secara pengupamaan, jika Peta Jalan adalah peta tujuan, maka Sekretariat Daerah adalah ruang mesin dan navigator yang memastikan kapal besar Pemprov DKI Jakarta sampai ke tujuan tersebut.

Elemen kerangka kerja, program utama dan inisiatif untuk Peta Jalan Jakarta Menuju 20 Besar Kota Global Dunia Fase tahun 2025 – 2029 yang berkaitan dengan Sekretariat Daerah, yang umumnya meliputi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi, pelayanan administratif, dan pembinaan aparatur diantaranya yaitu Pilar 5 Infrastruktur dan Mobilitas dan Pilar 7 Tata Kelola, Kelembagaan, dan Pembiayaan.

Pilar 5: Infrastruktur & Mobilitas

Elemen Kerangka Kerja: 5c. Infrastruktur & Aset Fisik

Program Utama: 5c.1 Menyelesaikan konsolidasi aset BMD, dengan **Inisiatif:**

- Membangun platform digital terpusat untuk mengkonsolidasikan semua data aset BMD. [5c.1.1]
- Mempercepat proses sertifikasi aset BMD yang belum terdaftar. [5c.1.2]
- Menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi aset yang belum dimanfaatkan dan memprioritaskannya untuk dimonetisasi. [5c.1.3]
- Memanfaatkan aset bersertifikat sebagai agunan untuk membuka berbagai skema pembiayaan pembangunan perkotaan. [5c.1.4]

Program Utama: 5c.2 Meningkatkan daya tarik aset BMD untuk kemitraan dengan sektor swasta, dengan **Inisiatif:**

- Memperkenalkan berbagai skema, termasuk penyewaan, usaha patungan, dan kemitraan pemerintah-swasta, untuk memonetisasi aset BMD yang kurang dimanfaatkan. [5c.2.1]
- Menawarkan insentif (misalnya, fiskal, tata ruang) kepada sektor swasta dalam memanfaatkan aset BMD, seperti TIF (pembiayaan kenaikan pajak) dan peningkatan zonasi. [5c.2.2]



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pilar 7 Tata Kelola, Kelembagaan, & Pembiayaan 6? atau lanjutan 1 ... sesuaikan

Elemen Kerangka Kerja: 7a. Organisasi & Tata Kelola

Program Utama: 7a.1 Membentuk unit-unit khusus untuk mempercepat pelaksanaan program strategis (seperti keberlanjutan, operator perkotaan, ekonomi malam, dan pengelolaan utang) serta membangun tim strategi yang berperan sebagai badan penasihat tingkat tinggi guna mendukung Gubernur dalam menangani isu-isu mendesak yang bersifat ad-hoc, dengan **Inisiatif:**

- Membentuk Kantor Manajemen Utang & Pembiayaan untuk mengelola pembayaran pinjaman. [7a.1.1]
- Membentuk Kantor Ketahanan Iklim untuk mendorong inisiatif-inisiatif keberlanjutan, termasuk percepatan penerapan harga karbon (Nilai Ekonomi Karbon - NEK). [7a.1.2]
- Meluncurkan Kantor Manajemen Proyek untuk mempercepat implementasi inisiatif strategis dan mengatasi hambatan-hambatan di departemen yang terlibat dalam strategi kota global. [7a.1.4]
- Membentuk tim strategi yang melapor langsung kepada Gubernur, dengan tugas mendukung penanganan isu-isu mendesak yang bersifat ad-hoc serta merancang perencanaan strategis jangka panjang; kelompok ini dapat ditempatkan di dalam Bappeda DKI Jakarta, sejalan dengan pembelajaran dari benchmark. [7a.1.5]

Program Utama: 7a.2 Memperkuat kemampuan dan kapasitas ASN, serta keberlanjutan tenaga kerja, dengan **Inisiatif:**

- Meninjau program "Grand Design Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2025-2029" yang ada untuk potensi pembaruan yang diperlukan; buat kerangka kerja monitoring dan evaluasi untuk memantau pelaksanaan serta dampaknya, dengan menggunakan indikator kinerja dan tinjauan kemajuan secara berkala. [7a.2.1]
- Melaksanakan program pendampingan bertahap yang melibatkan pegawai negeri sipil yang akan pensiun dengan pegawai junior selama periode serah terima yang terstruktur, untuk memastikan transfer pengetahuan yang lancar serta mendokumentasikannya secara resmi sebagai referensi di masa depan. [7a.2.2]
- Membangun lembaga pelatihan modular yang selaras dengan "Desain Besar Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2025-2029", dengan fokus untuk membekali pegawai negeri sipil, khususnya yang sedang atau akan menduduki Jabatan Manajerial, melalui program sertifikasi yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kepemimpinan mereka. [7a.2.3]
- Menganalisis tren pasar dan preferensi tenaga kerja, kemudian melaksanakan perekrutan strategis untuk menarik lulusan baru dan profesional muda untuk mengisi lebih dari ~27.000 lowongan penting. [7a.2.4]

Program Utama: 7a.3 Membentuk struktur tata kelola terpadu di seluruh wilayah aglomerasi, dengan **Inisiatif:**

- Mendorong pembentukan dewan kawasan aglomerasi untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

nasional kawasan Aglomerasi dan dokumen perencanaan pembangunan berupa rencana induk pembangunan di Kawasan Aglomerasi. [7a.3.1]

- Menerapkan model layanan bersama untuk memusatkan fungsi-fungsi yang diperlukan oleh aglomerasi, seperti transportasi, pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan, pengendalian banjir, pengelolaan air minum, pengelolaan limbah B-3 dan non B-3, infrastruktur wilayah, tata ruang, dan energi. [7a.3.2]

Elemen Kerangka Kerja: 7b. Kelincahan & Pelacakan Kelembagaan

Program Utama: 7b.1 Meningkatkan kualitas layanan online yang disediakan pemerintah, dengan **Inisiatif:**

- Mengintegrasikan alat interaktif seperti live chat, chatbot, dan meja bantuan ke dalam aplikasi JAKI untuk meningkatkan pengalaman pengguna. [7b.1.1]
- Memperluas cakupan aplikasi JAKI untuk mengkonsolidasikan layanan publik dalam satu platform "toko serba ada" yang komprehensif. [7b.1.2]

Program Utama: 7b.2 Memperkuat efisiensi sistem manajemen pengaduan, dengan **Inisiatif:**

- Menerapkan perutean berbasis AI dalam sistem CRM untuk secara otomatis mengarahkan pengaduan ke instansi terkait dan mengurangi waktu penyelesaian. [7b.2.1]
- Memulai kampanye kesadaran publik untuk mendorong adopsi yang lebih luas terhadap sistem CRM. [7b.2.2]

Program Utama: 7b.3 Mengembangkan dasbor terpadu untuk memusatkan pelacakan kinerja, dengan **Inisiatif:**

- Mengembangkan dasbor kinerja terpusat untuk mengintegrasikan dan memvisualisasikan data kinerja dari semua SKPD. [7b.3.1]
- Memperkenalkan pelacakan data historis jangka panjang pada dasbor untuk memantau tren secara berkelanjutan. [7b.3.2]
- Menambahkan visualisasi data interaktif, seperti grafik dan peta panas, untuk menyederhanakan pemahaman terhadap metrik kinerja. [7b.3.3]

Elemen Kerangka Kerja: 7e. Kebijakan & Peraturan

Program Utama: 7e.1 Menyederhanakan kerangka regulasi untuk mendukung Strategi Kota Global, dengan **Inisiatif:**

- Menyelaraskan peraturan nasional dengan kebijakan lokal dan regional. [7e.1.1]
- Merevisi peraturan lokal dan regional untuk mendukung strategi kota global. [7e.1.2]
- Menerapkan peraturan lokal dan regional yang baru untuk mendukung strategi kota global. [7e.1.3]

Inisiatif-inisiatif di atas secara umum bersinggungan langsung dengan fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah dalam hal koordinasi antar lembaga/SKPD, pengelolaan aset daerah, pembinaan ASN, reformasi birokrasi, penyusunan kebijakan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain inisiatif yang telah disebutkan, ada beberapa inisiatif lain dari dokumen tersebut yang juga sangat relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, terutama dalam perannya sebagai koordinator



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

penyusunan kebijakan, pemantau program, dan pengelola aset daerah, diantaranya yaitu:

Pilar 1: Bisnis dan Ekonomi

Elemen Kerangka Kerja: 1c. Pusat Ekonomi dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Program Utama: 1c.2 Memperkuat kolaborasi dan tata kelola regional dengan kawasan aglomerasi, dengan Inisiatif:

- Memformalkan dewan ekonomi regional untuk mengoordinasikan strategi infrastruktur dan ekonomi. [1c.2.1]
- Membuat rencana pengembangan aglomerasi yang terintegrasi dan melakukan pemantauan berkelanjutan terkait transportasi, penyediaan layanan dasar, dan sebagainya. [1c.2.2]

Program Utama: 1f.1 Meningkatkan kemudahan berbisnis di Jakarta, dengan Inisiatif:

- Menyederhanakan prosedur yang diperlukan untuk memulai usaha guna meningkatkan peringkat Jakarta dalam metrik "memulai usaha". [1f.1.2]
- Menurunkan biaya perizinan konstruksi dan mengurangi jumlah prosedur yang diperlukan. [1f.1.3]
- Memotong biaya pendaftaran properti dan menyederhanakan prosedur. [1f.1.4]
- Mengurangi biaya terkait sengketa komersial untuk memperbaiki skor metrik "penegakan kontrak". [1f.1.5]

Pilar 2: Masyarakat dan Tenaga Kerja

Elemen Kerangka Kerja: 2d. Kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI)

Program Utama: 2d.2 Mendukung kebijakan yang ramah keluarga di tempat kerja, dengan Inisiatif:

- Mewajibkan perusahaan dengan lebih dari 200 karyawan untuk menyediakan fasilitas penitipan anak di lokasi kerja serta menawarkan skema kerja fleksibel. [2d.2.1]

Pilar 3: Pariwisata dan Penjenamaan Kota (Branding)

Elemen Kerangka Kerja: 3b. Ekonomi Kreatif

Program Utama: 3b.3 Merampingkan proses untuk memfasilitasi berbagai acara, dengan Inisiatif:

- Membuat platform "satu jendela" yang memungkinkan penyelenggara acara untuk mengoordinasikan semua persyaratan logistik. [3b.3.1]
- Menerapkan sistem persetujuan jalur cepat untuk acara-acara kreatif dan budaya yang berdampak besar. [3b.3.2]

Pilar 4 Lingkungan dan Keberlanjutan

Elemen Kerangka Kerja: 4b. Operasi yang Berkelanjutan

Program Utama: 4b.4 Memperkuat manajemen keberlanjutan di tingkat perusahaan, dengan Inisiatif:

- Menerapkan kerangka pelaporan keberlanjutan wajib bagi bisnis menengah dan besar untuk memantau serta mengungkapkan emisi dan dampak lingkungan. [4b.4.1]



Pilar 6: Litbang dan Inovasi

Elemen Kerangka Kerja: 6a. Pengeluaran Penelitian dan Pengembangan

Program Utama: 6a.1 Meningkatkan mekanisme pendanaan penelitian dan pengembangan kelembagaanm, dengan **Inisiatif:**

- Menetapkan sistem alokasi hibah yang kompetitif dan melalui tinjauan sejawat untuk memprioritaskan proyek-proyek dengan dampak tinggi, dengan melibatkan panel penilai yang terdiri dari akademisi, pakar industri, dan pembuat kebijakan. [6a.1.1]

Elemen Kerangka Kerja: 6c. Kemitraan

Program Utama: 6c.1 Memperkuat kolaborasi lintas sektor, dengan **Inisiatif:**

- Mengembangkan Urban Knowledge Hub di Jakarta sebagai platform kolaboratif bagi para pemangku kepentingan internasional dan lokal untuk berbagi data, alat, dan strategi. [6c.1.1], Inisiatif-inisiatif ini menyoroti peran penting Sekretariat Daerah dalam:
 - **Koordinasi Regional:** Memimpin atau memfasilitasi pembentukan dewan ekonomi regional dan rencana pengembangan aglomerasi.
 - **Reformasi Regulasi:** Menyederhanakan berbagai perizinan dan prosedur untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha.
 - **Kebijakan Sosial:** Mendorong penerapan kebijakan yang mendukung kesetaraan dan kesejahteraan di lingkungan kerja.
 - **Pengambilan Keputusan Berbasis Data:** Mengembangkan platform terpusat untuk memfasilitasi koordinasi dan pengambilan keputusan yang efisien.
 - **Pengawasan dan Pelaporan:** Menerapkan kerangka kerja wajib bagi perusahaan untuk melaporkan dampak lingkungan mereka.

2.2.2 Identifikasi Permasalahan

Identifikasi ini secara umum dilakukan dengan **membandingkan tugas/fungsi formal Sekda dengan kinerja nyata**, lalu menarik permasalahan pokok yang berulang dan berdampak besar pada kualitas layanan publik, analisa ini dikenal juga dengan nama *“Gap analysis”*.

Teknis yang digunakan dalam melakukan identifikasi permasalahan didalam sekretariat daerah adalah dengan melakukan beberapa hal sbb:

1. Dokumentasi: telaah Renstra, Renja, RPJMD, dan laporan kinerja Sekda tahun 2021-2024.
2. Wawancara/FGD: dengan kepala/utusan biro, asisten Sekda, dan staf yang telah dilakukan di bulan Juli 2025, FGD ini juga dilakukan dengan mengirimkan form kuesioner untuk mendapatkan aspirasi dari masing-masing biro dibawah sekretariat daerah provinsi DKI Jakarta.
3. Observasi: terhadap alur pelayanan administrasi dalam sekretariat daerah.
4. Analisis Data: bandingkan indikator kinerja utama (IKU) dengan realisasi di tahun sebelumnya.

Tabel 2.14 Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No	Topik	Permasalahan	Lembaga/Biro
----	-------	--------------	--------------



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

1.	Sumber Daya Manusia	1. Kurangnya jumlah SDM di Sekretariat Daerah yang disebabkan oleh pensiun 2. Pendidikan dan kompetensi SDM belum sesuai dengan kebutuhan dan belum tersebar merata sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing – masing biro 3. Kualitas dan kuantitas Diklat dianggap belum memenuhi standard 4. Kurangnya kedisiplinan SDM dalam bekerja. 5. KPI SDM per masing-masing biro belum optimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Biro	- Kesejahteraan sosial - PLH - KSD - UASD - Pemerintahan - ORB - Kesejahteraan sosial - Kepala Daerah - DikMental - Hukum
2.	Sarana dan Prasarana	1. Sistem online yang belum terintegrasi dengan baik (perlunya sistem andal dan terintegrasi) 2. Sistem e-Office yang belum terlaksana secara optimal 3. Prasarana fisik yang belum memadai sesuai perkembangan teknologi sehingga diperlukan peremajaan dan penambahan	
3.	Koordinasi	1. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar fungsi terkait 2. Penghimpunan data dan informasi yang belum terintegrasi	- Pemerintahan - Kepala Daerah - Kesejahteraan sosial - PLH - KSD - Pemerintahan - ORB - Kesejahteraan sosial - Kepala Daerah - DikMental
4.	Kebijakan	1. Perlunya revisi dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada 2. Perlunya penambahan kebijakan baru untuk SKPD yang belum memiliki standar KPI	- Pemerintahan - ORB - Kepala Daerah
5.	Teknologi	Perlunya penyesuaian kebijakan serta prasarana terhadap kemajuan teknologi yang ada	- ORB - Pemerintahan - KSD - UASD - Kepala Daerah

Sumber: Hasil kuesioner aspirasi Biro, 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa permasalahan yang muncul pada biro-biro di sekretariat daerah provinsi DKI Jakarta merupakan masalah berulang yang telah ada dari tahun-tahun sebelumnya dimana permasalahan tersebut memerlukan solusi bertahap untuk dapat diselesaikan secara menyeluruh. Permasalahan yang dihimpun dari seluruh biro yang berada dibawah naungan sekretaris daerah ini termasuk kedalam permasalahan fundamental yang ada pada suatu instansi yang menangani masalah koordinasi antar lini dalam pemerintahan provinsi, seperti masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dan juga kendala dalam koordinasi serta kecukupan prasarana dan sarana. Seringkali permasalahan ini dianggap ringan padahal sangat menentukan kinerja dari sekretaris daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjaga koordinasi antar lembaga didalam pemerintah provinsi DKI Jakarta.



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

2.2.3 Rumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah

Permasalahan dan isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta terbagi atas (a) lingkup internal yang dihadapi oleh unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta (b) lingkup layanan publik kepada masyarakat luas dan pencapaian arah kebijakan yang diamanatkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029.



Tabel 2.15 Isu Strategis Sekretariat Daerah

No	Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
1	Kolaborasi Peningkatan kolaborasi dalam pelaksanaan program pembangunan bersama dengan NGO, asosiasi, dan lainnya, seperti kolaborasi pemenuhan sarana prasarana perkotaan	1. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar fungsi terkait 2. Penghimpunan data dan informasi yang belum terintegrasi	Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK menuju kota berkelanjutan	Masih rendahnya partisipasi dan aksi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Minimnya sinergi antar multi aktor, lemahnya penerapan atas rencana tata ruang dan instrumen lingkungan hidup, kolaborasi masih bersifat <i>project based</i>	Minimnya partisipasi publik untuk pemulihan dan pencegahan kerusakan lingkungan, tumpang tindih kewenangan, minimnya edukasi dan kesadaran kolektif warga	Tercapainya tata kelola organisasi perangkat daerah yang dinamis
2	Peningkatan IPTEK untuk Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat dengan berbasis elektronik.	1. Perlunya penyesuaian kebijakan serta prasarana terhadap kemajuan teknologi yang ada 2. Sistem online yang belum terintegrasi dengan baik (perlunya sistem andal dan terintegrasi) 3. Sistem e-Office yang belum terlaksana secara optimal 4. Prasarana fisik yang belum memadai sesuai perkembangan teknologi sehingga diperlukan peremajaan dan penambahan		E-government belum terintegrasi antar lembaga dan daerah	Belum efektifnya penerapan SPBE dan e-government, tantangan privasi dan keamanan data	Minimnya jumlah SDM aparatur untuk mengelola sistem informasi pemerintahan secara efektif dan aman, masih perlu penguatan keamanan siber untuk pelayanan publik berbasis digital	
3	Inovasi Daerah Peningkatan riset dan jumlah inovasi daerah yang diusulkan	1. Kurangnya jumlah SDM di Sekretariat Daerah yang disebabkan oleh pensiun		Rendahnya pengembangan teknologi hijau, minimnya dukungan	Lambatnya adopsi penerapan inovasi daerah, kurangnya skema insentif,	Kurangnya akses teknologi, kurangnya kapasitas SDM	Peningkatan kualitas layanan pimpinan dan pengadministrasian sekretariat daerah



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah							
No	Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
	dari UKPD atau SDM untuk keberlanjutan SDA.	2. Pendidikan dan kompetensi SDM belum sesuai dengan kebutuhan dan belum tersebar merata sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing – masing biro 3. Kualitas dan kuantitas Diklat dianggap belum memenuhi standard 4. Kurangnya kedisiplinan SDM dalam bekerja 5. KPI SDM per masing-masing biro belum optimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Biro		pendanaan riset, rendahnya kemitraan lintas sektor	lemahnya koneksi antara riset dan kebijakan publik		
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan 2024, indeks kepuasan layanan Kota Administrasi (IKLK): 95,61; indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan 96,8; dan indeks efektifitas koordinasi kota administrasi 94,42	1. Perlunya revisi dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada 2. Perlunya penambahan kebijakan baru untuk SKPD yang belum memiliki standar KPI	Belum optimalnya tata kelola yang baik	Masih diperlukannya peningkatan kualitas, konsistensi, inklusifitas, dan partisipasi pelayanan publik	Ketimpangan kualitas layanan, lambatnya respons dan prosedur yang rumit, masih diperlukan peningkatan akuntabilitas dalam layanan publik	Tingginya harapan masyarakat terhadap layanan pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan untuk memberikan layanan masyarakat secara cepat dan efektif.	1. Percepatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan 2. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah
5	SAKIP Berdasarkan LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2024, nilai implementasi SAKIP			Fragmentasi atau ketidakterpaduan antara Perencanaan,	Masih berorientasi sebagai pelaporan kegiatan, bukan pada capaian outcome atau	Masih diperlukan perencanaan dan pengukuran yang cermat atas	



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah							
No	Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
	dari 83,05% di tahun 2023 menjadi 85,75% di tahun 2024			Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	dampak kebijakan terhadap publik.	perjanjian kinerja dari renstra hingga menjadi tingkat individu	
6	<i>Kerja Sama dan Kolaborasi antar Wilayah Fungsional</i> Perlunya menjalin kerja sama dengan kerja sama dengan Bogor, Depok, Kota Tangerang Selatan, Bekasi, dan Cianjur (Bodetabekjur) tentang ketahanan pangan, transportasi, dan penyediaan air bersih.	1. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar fungsi terkait 2. Penghimpunan data dan informasi yang belum terintegrasi		Masih adanya perbedaan kepentingan, kurang harmonis antar regulasi, dan minimnya mekanisme pembiayaan bersama	Fragmentasi kewenangan antar daerah dan pusat, belum efektifnya badan koordinasi Jabodetabek khususnya menghadapi isu lintas batas	Ketimpangan kemampuan APBD, SDM birokrasi, dan infrastruktur	Meningkatkan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Renstra Sekretariat Daerah, 2025

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

Tujuan renstra perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan pernyataan tentang hal-hal yang akan dicapai untuk menjawab visi, misi, dan isu strategis yang akan diselesaikan hingga akhir tahun 2029. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai sebagai penjabaran lebih spesifik dan terukur dari sebuah tujuan yang ditetapkan. Sasaran renstra perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta menggambarkan hasil pembangunan perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang ingin dihasilkan disusun secara spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), relevan (*relevant*), dan terikat waktu tertentu (*time-bound*). Tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta disusun untuk menjawab pencapaian visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025-2029.

Tujuan Rencana Strategis 2025-2029 Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah:

“Meningkatkan kualitas kebijakan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pelayanan administratif serta meningkatnya kolaborasi dan kemitraaan strategi daerah”

Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Renstra 2025-2029 adalah:

- 1. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah;*
- 2. Percepatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan;*
- 3. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah*
- 4. Tercapainya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis*
- 5. Meningkatkan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah*

Analisis tujuan dan sasaran ini didasarkan pada peraturan yang ada dan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, yang menjadi jembatan menuju RPJMD 2025-2029, serta amanat UU DKJ yang baru.



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Selain dari isu strategis yang telah di rangkum, tujuan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2025-2029 berdasarkan beberapa dokumen berikut:

1. **Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) berupa:**
 - a. UU No. 2 tahun 2024 tentang provinsi DKI Jakarta 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dimana didalamnya dengan jelas mengamankan Jakarta untuk menjadi **Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global**. Ini menjadi norma tertinggi yang mengharuskan semua sasaran diarahkan untuk meningkatkan daya saing global, bukan hanya nasional.
 - b. Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang **sasaran-sasaran yang terukur secara kuantitatif**, lengkap dengan indikator kinerja dan target yang jelas untuk periode 2025-2029
 - c. PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur mengenai **"kinerja optimal"** dan **"akuntabel"**. Indikator seperti nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) adalah standar nasional yang wajib digunakan
 - d. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyangkut mengenai akuntabilitas keuangan dari sekretariat daerah
 - e. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan perwujudan pemerintahan yang modern.
2. **Proyeksi sasaran dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 yang relevan terhadap tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu 2 Pilar "Tata Kelola Pemerintahan yang Modern, Akuntabel, dan Berkinerja Optimal" dan "Akselerasi Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi Global".**

Sasaran dari pilar pertama yang relevan dengan Sekretariat Daerah adalah:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Indikator Kinerja Utama: Opini BPK RI terhadap LKPD. Contoh target di tahun 2029 adalah Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- b. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama: Nilai Evaluasi SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi. Contoh target di tahun 2029 adalah Nilai SAKIP pada predikat "AA" dan Indeks RB pada predikat "A".
- c. Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintahan yang Terpadu. Indikator Kinerja Utama: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Contoh target di tahun 2029 adalah Indeks SPBE mencapai skor 4.2 (Predikat "Sangat Baik").
- d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator Kinerja Utama: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Opini Ombudsman). Contoh target 2029 adalah



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Rata-rata Nilai IKM di atas 92 dan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik berada di Zona Hijau.

Sasaran dari pilar kedua yang relevan dengan Sekretariat Daerah adalah:

- a. **Menguatnya Daya Tarik dan Realisasi Investasi.** Indikator Kinerja Utama: Realisasi Investasi (PMA dan PMDN). Contoh Target 2029: Pertumbuhan realisasi investasi rata-rata 7% per tahun atau mencapai nilai kumulatif tertentu (misal: Rp 600 Triliun dalam 5 tahun).
- b. **Meningkatnya Daya Saing Jakarta sebagai Pusat Ekonomi Global.** Indikator Kinerja Utama: Peringkat Jakarta dalam *Global City Index* atau *Ease of Doing Business* (jika ada indeks subnasional yang relevan). Contoh Target 2029: Masuk dalam Peringkat 50 Besar Kota Global Dunia.
- c. **Menguatnya Ekosistem Inovasi dan Ekonomi Kreatif** Indikator Kinerja Utama: Skor dan Predikat Indeks Inovasi Daerah (IID) dari Kemendagri. Contoh Target 2029: Peringkat 1 Nasional dengan Predikat "Sangat Inovatif".
- d. **Sasaran: Meningkatkan Peran Serta Badan Usaha dan Masyarakat dalam Pembangunan.** Indikator Kinerja Utama: Jumlah Proyek Strategis Daerah yang Dikerjasamakan melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) atau skema kolaborasi lainnya. Contoh Target 2029: Terlaksananya minimal 5 Proyek KPBU skala besar.

Secara keseluruhan, NSPK memberikan kerangka legal dan teknis, sementara Sasaran RPJMD menerjemahkan visi besar "Jakarta Kota Global" menjadi target-target yang konkret, terukur, dan dapat dievaluasi pencapaiannya secara periodik.

Tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 dilaksanakan sebagai penjabaran visi-misi-tujuan-dan sasaran Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025-2029, yaitu: (a) Misi nomor 3: *Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal*; (b) Tujuan (Kode 3.1): Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern; dan (c) Sasaran (Kode 3.1.4): Meningkatkan Kemudahan dan Kualitas Layanan Masyarakat. Tabel 3.1 menunjukkan *cascading* dari tingkat provinsi hingga menjadi tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2029.

Tabel 3.1 menguraikan indikator dan target tahunan untuk setiap sasaran renstra perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						2026	2027	2028	2029	2030	
Sasaran RPJMD DKI Jakarta 2025 – 2029: “Tata Kelola Pemerintahan yang Modern, Akuntabel, dan Berkinerja Optimal” dan “Akselerasi Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi Global”	Meningkatkan kualitas kebijakan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pelayanan administratif serta meningkatnya kolaborasi dan kemitraaan strategi daerah	1. Peningkatan kualitas layanan pimpinan dan pengadministrasian sekretariat daerah 2. Percepatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor	3.6684	3.6684	3.6685	3.6686	3.6687	3.6688	3.669
		3. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah 4. Tercapainya tata kelola organisasi perangkat daerah yang dinamis 5. Meningkatkan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah	Nilai Efektivitas Kerjasama Daerah (NEKD)	Nilai	0	4	4	5	5	5	5

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Renstra Sekretariat Daerah, 2025



3.2 Strategi Renstra Sekretariat Daerah

Strategi renstra perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komperhensif berisikan langkah – langkah/upaya yang dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Sekretariat Daerah. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah tahun 2025 - 2029. Tahapan Renstra Sekretariat Daerah dapat dilihat pada table 3.2 sedangkan tabel 3.3 sebagai penjabaran strategi renstra perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 bersumber dari indikator kinerja program untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama yang ditetapkan.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2029

Tahap 1 (2025)	Tahap 2 (2026)	Tahap 3 (2027)	Tahap 4 (2028)	Tahap 5 (2029)
Meningkatkan kepuasan pelayanan kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik	Meningkatkan kepuasan pelayanan kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik	Meningkatkan kepuasan pelayanan kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik	Meningkatkan kepuasan pelayanan kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik	Meningkatkan kepuasan pelayanan kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik
Terlaksananya fasilitasi pelayanan kepala daerah dengan baik	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kepala daerah dengan baik	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kepala daerah dengan baik	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kepala daerah dengan baik	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kepala daerah dengan baik
Meningkatnya kinerja pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan urusan pemerintah daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah
Terdapat rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi	Terdapat rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi	Terdapat rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi	Terdapat rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi	Terdapat rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi
Keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Keberhasilan pembangunan Zona Integritas
Meningkatkan Indeks BerAkhlak	Meningkatkan Indeks BerAkhlak	Meningkatkan Indeks BerAkhlak	Meningkatkan Indeks BerAkhlak	Meningkatkan Indeks BerAkhlak
Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Tahap 1 (2025)	Tahap 2 (2026)	Tahap 3 (2027)	Tahap 4 (2028)	Tahap 5 (2029)
Meningkatkan kerjasama yang terimplementasi	Meningkatkan kerjasama yang terimplementasi	Meningkatkan kerjasama yang terimplementasi	Meningkatkan kerjasama yang terimplementasi	Meningkatkan kerjasama yang terimplementasi
Meningkatkan kolaborasi yang terimplementasi	Meningkatkan kolaborasi yang terimplementasi	Meningkatkan kolaborasi yang terimplementasi	Meningkatkan kolaborasi yang terimplementasi	Meningkatkan kolaborasi yang terimplementasi
Melakukan evaluasi kerja sama dan kolaborasi yang terimplementasi	Melakukan evaluasi kerja sama dan kolaborasi yang terimplementasi	Melakukan evaluasi kerja sama dan kolaborasi yang terimplementasi	Melakukan evaluasi kerja sama dan kolaborasi yang terimplementasi	Melakukan evaluasi kerja sama dan kolaborasi yang terimplementasi

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Renstra Sekretariat Daerah, 2025

Tabel 3.3 Strategi penahapan renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025 - 2029

Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Tahapan					Kondisi Akhir
				2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan kepuasan pelayanan kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik	Persentase kepuasan pelayanan kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Terlaksananya fasilitasi pelayanan kepala daerah dengan baik	Persentase fasilitasi pelayanan kepala daerah yang terlaksana dengan baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya kinerja pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase peningkatan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase	0	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah	Indeks kualitas kebijakan	nilai	58,43	63	67	71	75	80	80
Terdapat rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi	Skor rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi	Skor	6,19	6,25	6,3	6,35	6,4	6,45	6,45
Keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Skor tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	Skor	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2
Meningkatkan Indeks BerAkhlak	Skor Indeks BerAkhlak	Skor	80.09	80.5	81	81.5	82	83	83
Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Opini	5	5	5	5	5	5	5
Meningkatkan kerjasama yang terimplementasi	Persentase kerjasama terimplementasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan kolaborasi yang terimplementasi	Persentase kolaborasi yang terimplementasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Melakukan evaluasi kerja sama dan kolaborasi yang terimplementasi	Evaluasi kerja sama dan kolaborasi yang terimplementasi	Laporan	0	2	2	2	2	2	10

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Renstra Sekretariat Daerah, 2025



3.3 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 - 2029

Arah kebijakan renstra perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah rangkaian kerja operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi untuk mencapai target tujuan dan sasaran renstra. Arah kebijakan renstra perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 disajikan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.4 Arah kebijakan renstra Sekretariat Daerah 2025 - 2029

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah
a. UU No. 2 tahun 2024 tentang provinsi DKI Jakarta 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dimana didalamnya dengan jelas mengamanatkan Jakarta untuk menjadi Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Ini menjadi norma tertinggi yang mengharuskan semua sasaran diarahkan untuk meningkatkan daya saing global, bukan hanya nasional. b. Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang sasaran-sasaran yang terukur secara kuantitatif, lengkap dengan indikator kinerja dan target yang jelas untuk periode 2025-2029 c. PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur mengenai "kinerja optimal" dan "akuntabel". Indikator seperti nilai	Tujuan Sasaran RPJMD: "Tata Kelola Pemerintahan yang Modern, Akuntabel, dan Berkinerja Optimal" dan "Akselerasi Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi Global" 1. Pengembangan peta potensi dan peluang investasi di Jakarta 2. Penguatan kebijakan terkait kemudahan membuka bisnis/usaha 3. Fasilitasi calon investor yang tertarik untuk berinvestasi di Jakarta khususnya pada proyek Pemerintah 4. Pelaksanaan riset pasar/investor mapping behaviour negara-negara investor 5. Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha 6. Pengelolaan ekosistem inovasi daerah yang mampu mendorong penciptaan kluster inovasi 7. Kolaborasi pentahelix	1. Meningkatkan kepuasan pelayanan kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik 2. Terlaksananya fasilitasi pelayanan kepala daerah dengan baik 3. Meningkatnya kinerja pelaksanaan urusan pemerintah daerah 4. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah 5. Terdapat rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi 6. Keberhasilan pembangunan Zona Integritas 7. Meningkatkan Indeks BerAkhlak 8. Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik 9. Meningkatkan kerjasama yang



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) adalah standar nasional yang wajib digunakan d. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyangkut mengenai akuntabilitas keuangan dari sekretariat daerah e. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan perwujudan pemerintahan yang modern.	antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media 8. Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah Kondisi di Akhir RPJMD: Peningkatan efektivitas ekonomi untuk menambah daya tarik Jakarta dalam menarik investasi, kerja sama, dan talenta SDM global yang terbaik Indikator: Indeks Daya Saing Daerah, Pembentukan Modal Tetap Bruto	terimplementasi 10. Meningkatkan kolaborasi yang terimplementasi 11. Melakukan evaluasi kerja sama dan kolaborasi yang terimplementasi

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Renstra Sekretariat Daerah, 2025

3.4 Penyusunan Pohon Kinerja Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Pohon kinerja renstra perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 disusun selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja disusun atas 4 (empat) tahapan yaitu (a) tahap pertama dengan menetapkan hasil (outcome); (b) tahap kedua dengan mengidentifikasi *critical success factor (CSF)* hasil (outcome); (c) tahap ketiga dengan menguraikan *critical success factor*; dan (d) tahap keempat dengan melengkapi indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, dan sasaran dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) dengan memenuhi kriteria SMART: spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), relevan (*relevant*), dan terikat waktu tertentu (*time-bound*). Tahapan penyusunan pohon kinerja untuk Renstra Sekretariat Daerah tercantum pada tabel dan gambar berikut.



	(Muatan Teknokratis) Isu Strategis Sekretariat Daerah	(ULTIMATE OUTCOME) Tujuan Renstra
Mandat (Dasar Hukum) Tujuan Sasaran RPJMD: “Tata Kelola Pemerintahan yang Modern, Akuntabel, dan Berkinerja Optimal” dan “Akselerasi Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi Global” 1. Pengembangan peta potensi dan peluang investasi di Jakarta 2. Penguatan kebijakan terkait kemudahan membuka bisnis/usaha 3. Fasilitasi calon investor yang tertarik untuk berinvestasi di Jakarta khususnya pada proyek Pemerintah 4. Pelaksanaan riset pasar/investor mapping behaviour negara-negara investor 5. Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha 6. Pengelolaan ekosistem inovasi daerah yang mampu mendorong penciptaan kluster inovasi 7. Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media 8. Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	1. Tercapainya tata kelola organisasi perangkat daerah yang dinamis 2. Peningkatan kualitas layanan pimpinan dan pengadministrasian sekretariat daerah	Meningkatkan kualitas kebijakan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pelayanan administratif serta meningkatnya kolaborasi dan kemitraaan strategi daerah
Harapan Kondisi di Akhir RPJMD: Peningkatan efektivitas ekonomi untuk menambah daya tarik Jakarta dalam menarik investasi, kerja sama, dan talenta SDM global yang terbaik Indikator: Indeks Daya Saing Daerah, Pembentukan Modal Tetap Bruto		

112



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Tabel 3.6 Rumusan sasaran Renstra berdasarkan CSF tujuan Renstra

(Ultimate outcome) Tujuan Renstra	Kondisi yang diharapkan di akhir Renstra	(Critical Success Factor) Strategi Renstra	(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra
Meningkatkan kualitas kebijakan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pelayanan administratif serta meningkatnya kolaborasi dan kemitraaan strategi daerah	Kepuasan pelayanan di kompleks Balaikota dan rumah dinas pimpinan meningkat melalui penyelenggaraan layanan yang profesional dan responsif.	Meningkatkan kepuasan pelayanan kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik	Peningkatan kualitas layanan pimpinan dan pengadministrasian sekretariat daerah
	Fasilitasi pelayanan kepada kepala daerah terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kepala daerah dengan baik	
	Kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah meningkat sehingga mendukung terwujudnya tata kelola yang efektif dan efisien.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Percepatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan
	Kualitas kebijakan pemerintah daerah semakin baik, berbasis data, aspiratif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah
	Rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi tersusun secara komprehensif sebagai pedoman transformasi tata kelola pemerintahan.	Terdapat rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi	Tercapainya tata kelola organisasi perangkat daerah yang dinamis
	Pembangunan Zona Integritas berhasil diwujudkan sebagai langkah nyata menuju birokrasi yang bersih dan melayani.	Keberhasilan pembangunan Zona Integritas	
	Indeks BerAKHLAK meningkat sebagai wujud penguatan nilai dasar ASN yang profesional dan berintegritas.	Meningkatkan Indeks BerAkhlaq	
	Kualitas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik meningkat sehingga menjamin transparansi dan akuntabilitas.	Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

(Ultimate outcome) Tujuan Renstra	Kondisi yang diharapkan di akhir Renstra	(Critical Success Factor) Strategi Renstra	(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra
	Kerja sama yang terjalin terimplementasi secara nyata dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.	Meningkatkan kerjasama yang terimplementasi	Meningkatkan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah
	Kolaborasi antar pihak terwujud dan terimplementasi dalam program nyata yang berdampak positif bagi masyarakat.	Meningkatkan kolaborasi yang terimplementasi	
	Evaluasi terhadap kerja sama dan kolaborasi dilaksanakan secara konsisten sehingga menghasilkan perbaikan berkelanjutan.	Melakukan evaluasi kerja sama dan kolaborasi yang terimplementasi	

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Renstra Sekretariat Daerah, 2025

Tabel 3.7 Rumusan program perangkat daerah berdasarkan CSF sasaran Renstra

(Intermediate outcome) Sasaran renstra	Kondisi yang diharapkan di akhir renstra	(Critical Success Factor) Strategi renstra	Program perangkat daerah
Peningkatan kualitas layanan pimpinan dan pengadministrasian sekretariat daerah	Kepuasan pelayanan di kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan meningkat melalui penyelenggaraan layanan yang profesional dan responsif.	Meningkatkan kepuasan pelayanan kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
	Fasilitasi pelayanan kepada kepala daerah terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kepala daerah dengan baik	
Percepatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan	Kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah meningkat sehingga mendukung terwujudnya tata kelola yang efektif dan efisien.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan urusan pemerintah daerah	1. Program pemerintahan dan otonomi daerah 2. Program kesejahteraan rakyat 3. Program perekonomian dan pembangunan 4. Program kebijakan administrasi pembangunan
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah	Kualitas kebijakan pemerintah daerah semakin baik, berbasis data, aspiratif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah	Program fasilitasi dan koordinasi hukum

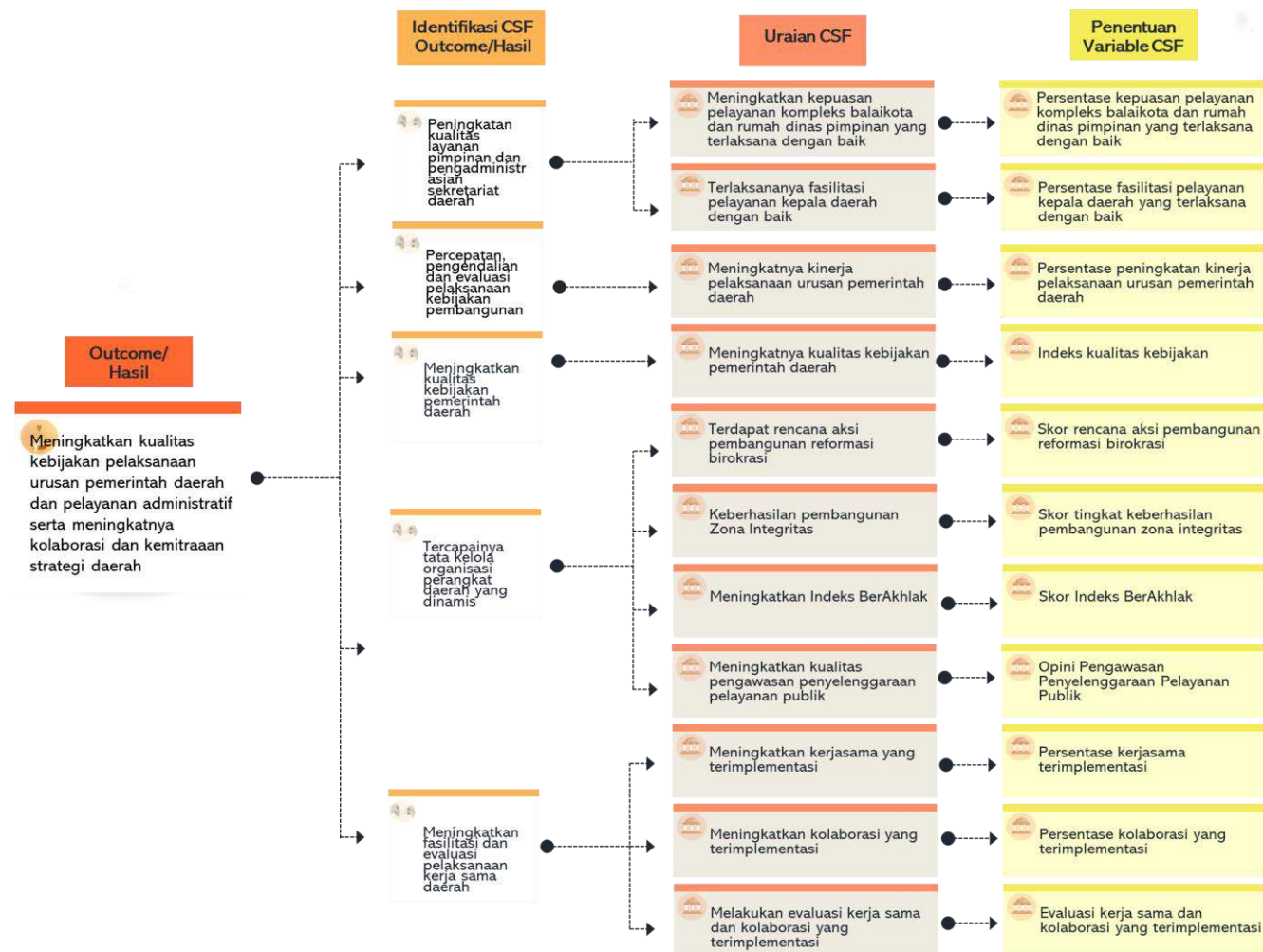


RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

(Intermediate outcome) Sasaran renstra	Kondisi yang diharapkan di akhir renstra	(Critical Success Factor) Strategi renstra	Program perangkat daerah
Tercapainya tata kelola organisasi perangkat daerah yang dinamis	Rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi tersusun secara komprehensif sebagai pedoman transformasi tata kelola pemerintahan.	Terdapat rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi	Program penataan organisasi
	Pembangunan zona integritas berhasil diwujudkan sebagai langkah nyata menuju birokrasi yang bersih dan melayani.	Keberhasilan pembangunan zona integritas	
	Indeks berakhlak meningkat sebagai wujud penguatan nilai dasar asn yang profesional dan berintegritas.	Meningkatkan indeks berakhlak	
	Kualitas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik meningkat sehingga menjamin transparansi dan akuntabilitas.	Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	
Meningkatkan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah	Kerja sama yang terjalin terimplementasi secara nyata dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.	Meningkatkan kerjasama yang terimplementasi	Program penataan organisasi apakah sama
	Kolaborasi antar pihak terwujud dan terimplementasi dalam program nyata yang berdampak positif bagi masyarakat.	Meningkatkan kolaborasi yang terimplementasi	
	Evaluasi terhadap kerja sama dan kolaborasi dilaksanakan secara konsisten sehingga menghasilkan perbaikan berkelanjutan.	melakukan evaluasi kerja sama dan kolaborasi yang terimplementasi	

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Renstra Sekretariat Daerah, 2025

Gambar 3.1 Pohon kinerja Sekretariat Daerah



Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Renstra Sekretariat Daerah, 2025

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

Program renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2029, terdiri atas:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Kode 4.01.01)
- Program Penataan Organisasi (Kode 4.01.02)
- Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Kode 4.01.03)
- Program Kesejahteraan Rakyat (Kode 4.01.04)
- Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum (Kode 4.01.05)
- Program Perekonomian dan Pembangunan (Kode 4.01.06)
- Program Kebijakan Administrasi Pembangunan (Kode 4.01.08)

4.2 Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Tahun 2025-2029

Kegiatan dan subkegiatan renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2029, dibagi berdasarkan biro-biro yang berada di bawah Sekretariat Daerah. Rincian pembagian program berdasarkan Unit Kerja Perangkat Daerah/Penanggung Jawab dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Rincian unit kerja pelaksana program

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	- Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD - Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD - Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD - Bagian Rumah Tangga - Biro UASD - Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro ORB - Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah - Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan - Biro Pemerintahan - Kelompok Tata Praja - Biro Pemerintahan - Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		10. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 11. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD 2. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 3. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 4. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro ORB 5. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 6. Kelompok Pembangunan Kota - biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 7. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 8. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengedalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial 9. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah – Biro UASD 2. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 3. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 4. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 5. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro ORB 6. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 7. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 8. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 9. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 2. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 3. Bagian Rumah Tangga - Biro uasd
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1. Bagian Rumah Tangga - Biro uasd 2. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan – Biro UASD 3. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 2. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 3. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 4. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 5. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah – Biro uasd 6. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD 7. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro ORB 8. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 9. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 10. Bagian Peraturan Perundang - Undangan - Biro Hukum 11. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 12. Kelompok Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 13. Kelompok Kesehatan - Biro Kesejahteraan Sosial
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bagian Rumah Tangga - Biro UASD
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - biro UASD 2. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 3. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 4. Bagian Peraturan Perundang - Undangan - Biro Hukum 5. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 6. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro ORB 7. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 8. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD 9. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 10. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 11. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial 12. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan umum - Biro Pemerintahan
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Kelompok Tata Praja - Biro Pemerintahan 3. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 3. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 4. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 5. Bagian Peraturan Perundang - Undangan - Biro Hukum 6. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 7. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro ORB 8. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 9. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial 10. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 11. Kelompok Tata Praja - Biro Pemerintahan
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Bagian administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 3. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 4. Bagian Peraturan Perundang - Undangan - Biro Hukum 5. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 6. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 7. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 8. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD 2. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 3. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro ORB
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd	1. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD 2. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 3. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 4. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 5. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 6. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro ORB



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		7. Kelompok kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 8. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 9. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1. kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 2. Bagian Peraturan Perundang - Undangan - Biro Hukum 3. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 4. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 2. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 3. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 4. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 2. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD 3. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 4. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 5. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro ORB 6. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 7. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 2. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 3. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 4. Kelompok Tata Praja - Biro Pemerintahan 5. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 6. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 3. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 4. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 5. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		6. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 7. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 8. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro ORB 9. Bagian Administrasi Kepala Daerah - Biro Kepala Daerah 10. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 11. Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan – Biro Pemerintahan 12. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 13. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
4.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD
4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Rumah Tangga - Biro UASD
4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Rumah Tangga - Biro UASD
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 3. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD 4. Bagian Rumah Tangga - Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah 5. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 6. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 7. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro ORB 8. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 9. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD 3. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 4. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 5. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 6. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 7. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 8. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro ORB 9. Kelompok Tata Praja - Biro Pemerintahan



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		10. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 11. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 12. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial 13. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 3. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD 4. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 5. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 3. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD 4. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD 5. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 6. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 7. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro ORB 8. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD 2. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 3. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 4. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 5. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 6. Kelompok reformasi birokrasi dan budaya kerja - Biro ORB 7. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial 8. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bagian Rumah Tangga - Biro UASD
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 2. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD
4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	1. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Bagian Administrasi Kepala Daerah - Biro Kepala Daerah
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bagian Administrasi Kepala Daerah - Biro Kepala Daerah
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bagian Administrasi Kepala Daerah - Biro Kepala Daerah
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Persidangan - Biro Kepala Daerah
4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Bagian Persidangan - Biro Kepala Daerah
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bagian Persidangan - Biro Kepala Daerah
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	1. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 2. Bagian Protokol - Biro Kepala Daerah 3. Bagian Administrasi Kepala Daerah - Biro Kepala Daerah 4. Bagian Persidangan - Biro Kepala Daerah
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 2. Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan - Biro Pemerintahan 3. Bagian Persidangan - Biro Kepala Daerah
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Administrasi Kepala Daerah - Biro Kepala Daerah
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Bagian Protokol - Biro Kepala Daerah
4.01.03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1. Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan - Biro Pemerintahan 2. Kelompok Pengaduan - Biro Pemerintahan 3. Kelompok Tata Praja - Biro Pemerintahan 4. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintaan Umum - Biro Pemerintahan
4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintaan Umum - Biro Pemerintahan 2. Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan - Biro Pemerintahan 3. Kelompok Pengaduan - Biro Pemerintahan 4. Kelompok Tata Praja - Biro Pemerintahan
4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	1. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 2. Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan - Biro pemerintahan 3. Kelompok Pengaduan - Biro Pemerintahan 4. Kelompok Tata Praja - Biro Pemerintahan
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan - Biro Pemerintahan
4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan - Biro Pemerintahan
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan - Biro Pemerintahan
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Bagian Kerja Sama Dalam Negeri - Biro Kerjasama Daerah
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Bagian Kerja Sama Dalam Negeri - Biro Kerjasama Daerah
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	1. Kelompok Kesehatan - Biro Kesejahteraan Sosial 2. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial 3. Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga - Biro Kesejahteraan Sosial
		1. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 2. Kelompok Mental Spiritual - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 3. Kelompok Pendidikan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Kelompok Mental Spiritual - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Kelompok Mental Spiritual - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Kelompok Mental Spiritual - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Kelompok Pendidikan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Kelompok Kesehatan - Biro Kesejahteraan Sosial
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga - Biro Kesejahteraan Sosial
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 2. Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga - Biro Kesejahteraan Sosial



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial
4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Kelompok Keuangan Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 2. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 3. Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal - Biro Perekonomian dan Keuangan 4. Kelompok Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan Serta Tenaga Kerja - Biro Perekonomian dan Keuangan
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 2. Kelompok Keuangan Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 2. Kelompok Keuangan Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 2. Kelompok Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan Serta Tenaga Kerja - Biro Perekonomian dan Keuangan 3. Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal - Biro Perekonomian dan Keuangan 4. Kelompok Keuangan Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 2. Kelompok Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan Serta Tenaga Kerja - Biro Perekonomian dan Keuangan 3. Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal - Biro Perekonomian dan Keuangan 4. Kelompok Keuangan Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Apbd	1. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 2. Kelompok Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan Serta Tenaga Kerja - Biro Perekonomian dan Keuangan 3. Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal - Biro Perekonomian dan Keuangan 4. Kelompok Keuangan Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Kelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 2. Kelompok Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 3. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 4. Kelompok Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 2. Kelompok Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 3. Kelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 4. Kelompok Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
4.01.05	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 2. Bagian Peraturan Perundang - Undangan li - Biro Hukum
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 2. Bagian Peraturan Perundang - Undangan li - Biro Hukum
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 2. Bagian Peraturan Perundang - Undangan li - Biro Hukum
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	1. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 2. Bagian Peraturan Perundang - Undangan li - Biro Hukum
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	1. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 2. Bagian Peraturan Perundang - Undangan li - Biro Hukum
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	1. Bagian Advokasi Hukum - Biro Hukum 2. Bagian Pelayanan Hukum - Biro Hukum
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Bagian Advokasi Hukum - Biro Hukum
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi Dan Ham	Bagian Pelayanan Hukum - Biro Hukum
4.01.02	Program Penataan Organisasi	1. Kelompok Kelembagaan - Biro ORB 2. Kelompok Analisis Jabatan - Biro ORB 3. Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik - Biro ORB
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kelompok Kelembagaan - Biro ORB
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Kelompok Kelembagaan - Biro ORB
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Kelompok Analisis Jabatan - Biro ORB
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1. kelompok reformasi birokrasi dan budaya kerja - biro orb



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2. Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik - Biro ORB
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro ORB
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro ORB
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro ORB
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik - Biro ORB
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik - Biro ORB
4.01.02	Program Penataan Organisasi	1. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri - Biro Kerjasama Daerah 2. Bagian Kerjasama Luar Negeri - Biro Kerjasama Daerah 3. Bagian Kerjasama Pihak Ketiga - Biro Kerjasama Daerah
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri - Biro Kerjasama Daerah 2. Bagian Kerjasama Luar Negeri - Biro Kerjasama Daerah 3. Bagian Kerjasama Pihak Ketiga - Biro Kerjasama Daerah
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri - Biro Kerjasama Daerah 2. Bagian Kerjasama Pihak Ketiga - Biro Kerjasama Daerah
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Bagian Kerjasama Luar Negeri - Biro Kerjasama Daerah
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri - Biro Kerjasama Daerah 2. Bagian Kerjasama Luar Negeri - Biro Kerjasama Daerah 3. Bagian Kerjasama Pihak Ketiga - Biro Kerjasama Daerah

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Renstra Sekretariat Daerah, 2025



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tabel 4.2 Program, kegiatan, subkegiatan, indikator pada renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Tujuan Sasaran RPJMD: “Tata Kelola Pemerintahan yang Modern, Akuntabel, dan Berkinerja Optimal” dan “Akselerasi Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi Global”	Meningkatkan kualitas kebijakan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pelayanan administratif serta meningkatnya kolaborasi dan kemitraan strategi daerah					
		Peningkatan kualitas layanan pimpinan dan pengadministrasian sekretariat daerah			1. Meningkatkan kepuasan pelayanan kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik 2. Terlaksananya fasilitasi pelayanan kepala daerah dengan baik	
			Terwujudnya kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan tugas pimpinan serta urusan pemerintahan daerah melalui dukungan layanan penunjang yang prima dan profesional.		1. Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah 2. Indeks kepuasan terhadap pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan kompleks balaikota serta rumah dinas pimpinan 3. Indeks kepuasan layanan keprotokolan, administrasi dan komunikasi pimpinan daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
				Terlaksananya layanan administrasi keuangan.	Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan	Administrasi keuangan perangkat daerah



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	Penyediaan gaji dan tunjangan asn
					Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd
				Terlaksananya layanan kepegawaian.	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
					Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
				Terlaksananya layanan administrasi umum.	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	Administrasi umum perangkat daerah
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga
					Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan bahan logistik kantor
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
					Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Penyediaan bahan/material



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd
					Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada skpd	Penatausahaan arsip dinamis pada skpd
					Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada skpd	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada skpd
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan.	Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai penganggaran yang efisien	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
					Jumlah paket mebel yang disediakan	Pengadaan mebel
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
					Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				Terlaksananya layanan penunjang untuk urusan pemerintahan daerah.	Indeks kepuasan terhadap kinerja layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
					Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang.	Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
					Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
				Terlaksananya layanan kedinasan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah.	Indeks kepuasan layanan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
					Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	Pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah
				Terlaksananya layanan kerumahtanggaan di lingkungan sekretariat daerah.	Indeks kepuasan layanan kerumahtanggaan sekretariat daerah	Fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah
					Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah
					Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah
					Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah
				Tersedianya materi dan terlaksananya	Indeks kepuasan penyediaan materi dan komunikasi pimpinan	Fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				layanan komunikasi pimpinan.		
					Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan	Penyiapan materi pimpinan
					Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	Fasilitasi komunikasi pimpinan
				Terlaksananya layanan keprotokolan.	Indeks kepuasan layanan keprotokolan	Fasilitasi keprotokolan
					Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara
					Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah
					Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan	Pengelolaan hubungan keprotokolan
		Percepatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan		Meningkatnya kinerja pelaksanaan urusan pemerintah daerah		
			Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintahan serta sinergi pembangunan melalui fasilitasi, koordinasi, dan kerjasama yang		1. Persentase upaya fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemerintahan dan otonomi daerah 2. Persentase kerjasama dalam negeri yang terimplementasi	Program pemerintahan dan otonomi daerah



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
			terkelola dengan baik.		3. Indeks kepuasan layanan administrasi dan keuangan perjalanan dinas	
				Laporan capaian pelaksanaan rencana aksi tugas pemerintahan.	Persentase capaian rencana aksi kegiatan pelaksanaan tugas pemerintahan	Pelaksanaan tugas pemerintahan
				Indeks kepuasan pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas	Indeks kepuasan pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan	Pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan
					Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan pemerintahan umum	Fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan wilayah	Fasilitasi penataan wilayah
				Laporan capaian pelaksanaan rencana aksi otonomi daerah.	Persentase capaian rencana aksi kegiatan pelaksanaan otonomi daerah	Pelaksanaan otonomi daerah
					Jumlah dokumen hasil pengembangan otonomi dan penataan urusan yang dilaksanakan	Pengembangan otonomi dan penataan urusan
					Jumlah laporan hasil evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan
				Dokumen laporan pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah.	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah	Fasilitasi kerja sama daerah



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
					Jumlah kerja sama antar pemerintah yang difasilitasi	Fasilitasi kerja sama antar pemerintah
			Meningkatnya efektivitas dan keterpaduan implementasi kebijakan serta program prioritas di bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan mental spiritual.		1. Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bawah koordinasi biro kesejahteraan sosial 2. Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bawah koordinasi biro pendidikan dan mental spiritual	Program kesejahteraan rakyat
				Terlaksananya layanan di bidang mental spiritual bagi masyarakat.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan mental spiritual	Fasilitasi pembinaan mental spiritual
					Jumlah lembaga bina spiritual yang difasilitasi	Fasilitasi kelembagaan bina spiritual
				Terlaksananya fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat di bidang pelayanan dasar.	Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar di bawah koordinasi biro pendidikan dan mental spiritual	Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar
				Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar di bawah koordinasi	Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar di bawah koordinasi biro kesejahteraan sosial	



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				biro kesejahteraan sosial		
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan	Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan	Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial	Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial
				Terlaksananya fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat di bidang non pelayanan dasar.	Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar di bawah koordinasi biro pendidikan dan mental spiritual	Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar
				Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar di bawah koordinasi biro kesejahteraan sosial	Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar di bawah koordinasi biro kesejahteraan sosial	



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja
			Terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola regulasi yang taat asas dalam setiap proses perumusan kebijakan daerah.		Persentase kebijakan sesuai dengan peraturan	Program perekonomian dan pembangunan
				Dokumen rekomendasi kebijakan bidang perekonomian dan keuangan.	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian dan keuangan yang disampaikan kepada pimpinan	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan ekonomi makro	Fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
			Terjaminnya ketertiban, kepatuhan, dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan pembangunan, dan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku.		1. Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan 2. Persentase upaya pengendalian pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup 3. Persentase upaya pengendalian pemenuhan kewajiban surat izin penunjukan penggunaan tanah (sippt)	Program kebijakan administrasi pembangunan
				Terkelolanya administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.	Persentase terkendalinya administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan	Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah
					Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan apbd	Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan apbd
				Dokumen laporan hasil pemantauan.	Persentase laporan hasil pemantauan yang diselesaikan tepat waktu	Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
					Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah		
			Meningkatnya kepastian hukum, perlindungan aset daerah, dan		1. Persentase produk hukum daerah yang diundangkan 2. Persentase penanganan	Program fasilitasi dan koordinasi hukum



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
			pemenuhan hak asasi manusia melalui produk hukum yang responsif dan penanganan perkara yang tuntas.		perkara litigasi yang diselesaikan 3. Persentase penanganan perkara non litigasi yang diselesaikan 4. Nilai capaian pelaksanaan aksi ham daerah	
				Dokumen produk hukum daerah yang telah diharmonisasi.	Persentase produk hukum yang diharmonisasi sesuai target propempergub	Fasilitasi penyusunan perundang-undangan
					Jumlah produk hukum pengaturan yang disusun	Fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan
					Jumlah produk hukum penetapan yang disusun	Fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan
					Jumlah produk hukum yang didokumentasi dan dikelola informasi hukumnya	Pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya
				Terlaksananya kegiatan fasilitasi bantuan hukum.	Persentase pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum	Fasilitasi bantuan hukum
					Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	Fasilitasi penyelesaian masalah hukum
					Jumlah masalah non litigasi dan ham yang diselesaikan	Fasilitasi penyelesaian masalah non litigasi dan ham
		Tercapainya tata kelola organisasi perangkat daerah yang dinamis			1. Terdapat rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi 2. Keberhasilan pembangunan zona integritas 3. Meningkatkan indeks berakhlak 4. Meningkatkan kualitas pengawasan	



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
					penyelenggaraan pelayanan publik	
			Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme kelembagaan perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.		Persentase perangkat daerah yang berada pada tingkat kematangan minimal sedang	Program penataan organisasi
				Dokumen laporan hasil evaluasi produktivitas dan efisiensi perangkat daerah.	Jumlah evaluasi produktivitas dan efisiensi perangkat daerah	Fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan
					Persentase penataan jabatan pada perangkat daerah sesuai standar	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota	Fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota
					Jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan	Penataan analisis jabatan
				Dokumen rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi.	Persentase penyusunan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi	Fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja
					Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi	Pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	Monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja
					Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja	Evaluasi pelaksanaan budaya kerja
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan tata laksana pemerintahan	Pengelolaan tatalaksana pemerintahan
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik	Fasilitasi peningkatan pelayanan publik
		Meningkatkan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah			1. Meningkatkan kerjasama yang terimplementasi 2. Meningkatkan kolaborasi yang terimplementasi 3. melakukan evaluasi kerja sama dan kolaborasi yang terimplementasi	
			Terwujudnya akselerasi pencapaian tujuan pembangunan melalui implementasi kerjasama strategis yang produktif dan saling menguntungkan.		Persentase kerjasama yang terimplementasi	Program penataan organisasi
				Dokumen laporan pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah.	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah	Fasilitasi kerja sama daerah



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	Fasilitasi kerja sama dalam negeri
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama luar negeri	Fasilitasi kerja sama luar negeri
					Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	Evaluasi pelaksanaan kerja sama

Berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, tabel diatas menunjukkan program dan proyeksi pemenuhan dari program-program ini sepanjang renstra ini dilaksanakan hingga 2030. Pada tabel 4.3 akan dijelaskan terdapat 7 program yang disertai dengan kegiatan dan sub kegiatan untuk dapat mencapai tujuan dari renstra sekretariat daerah, yaitu:

- 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
- 2. Program pemerintahan dan otonomi daerah
- 3. Program kesejahteraan rakyat
- 4. Program perekonomian dan pembangunan
- 5. Program kebijakan administrasi pembangunan
- 6. Program fasilitasi dan koordinasi hukum
- 7. Program penataan organisasi

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan								Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030				
			Target	Target	Target	Target	Target				
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				
Optimalnya manajemen, akuntabilitas keuangan, dan performa kinerja pemerintah											



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya kualitas kebijakan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pelayanan administratif	Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	3,6684	3,6684	1.579.461.619.997	3,6685	1.619.349.666.638	3,6686	1.666.742.404.710	3,6687	1.720.388.029.166	3,6688	1.134.147.093.802	
Peningkatan kualitas layanan pimpinan dan pengadministrasian sekretariat daerah	Persentase kepuasan pelayanan kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik	100	100	971.715.131.524	100	993.655.394.151	100	1.034.576.754.627	100	1.080.837.212.149	100	488.067.299.076	
	Persentase fasilitasi pelayanan kepala daerah yang terlaksana dengan baik	100	100		100		100		100		100		
Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Nilai kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	4	4	971.715.131.524	4	993.655.394.151	4	1.034.576.754.627	4	1.080.837.212.149	4	488.067.299.076	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 3. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD 4. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD 5. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro ORB



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
													6. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 7. Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan - Biro Pemerintahan 8. Kelompok Tata Praja - Biro Pemerintahan 9. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengedalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial 10. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 11. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
	Indeks kepuasan terhadap pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan kompleks balaikota	4	4		4		4		4		4		1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	serta rumah dinas pimpinan												Perlengkapan - Biro UASD 3. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD 4. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD
	Indeks kepuasan layanan keprotokolan, administrasi dan komunikasi pimpinan daerah	4	4		4		4		4		4		1. Bagian Administrasi Kepala Daerah - Biro Kepala Daerah 2. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 3. Bagian Persidangan - Biro Kepala Daerah 4. Bagian Protokol - Biro Kepala Daerah
Administrasi keuangan perangkat daerah	Nilai kepuasan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	4	4	644.486.797.219	4	658.044.626.647	4	671.665.406.219	4	698.349.741.653	4	72.097.425.111	1. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD 2. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 3. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 4. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 5. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 6. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026 Target	2026 Rp	2027 Target	2027 Rp	2028 Target	2028 Rp	2029 Target	2029 Rp	2030 Target	2030 Rp	
													7. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 8. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial 9. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	640	620	644.428.5 17.171	600	657.984.2 31.999	580	671.604.3 89.679	560	698.288.3 45.783	540	72.035.46 2.325	Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	28	36	58.280.04 8	36	60.394.64 8	36	61.016.54 0	36	61.395.87 0	36	61.962.78 6	1. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD 2. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 3. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 4. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 5. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
													Kerja - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 6. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 7. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 8. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 9. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Nilai kepuasan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	4	4	1.698.451.697	4	1.765.123.186	4	1.892.492.935	4	2.026.821.044	4	2.176.083.628	1. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 2. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 3. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	6	6	1.698.451.697	6	1.765.123.186	6	1.892.492.935	6	2.026.821.044	6	2.176.083.628	1. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD 2. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 3. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah
Administrasi umum perangkat daerah	Nilai kepuasan layanan administrasi umum perangkat daerah	4	4	19.011.442.392	4	19.854.581.995	4	25.544.027.769	4	21.217.989.587	4	24.487.873.848	1. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 2. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
													Keuangan 3. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 4. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 5. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD 6. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD 7. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 8. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 9. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 10. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 11. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 12. Kelompok Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Biro



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
													Pembangunan dan Lingkungan Hidup 13. Kelompok Kesehatan - Biro Kesejahteraan Sosial
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	1	2.750.956.130	1	2.750.956.130	1	2.750.956.130	1	3.026.051.743	1	3.328.656.917	Bagian Rumah Tangga - Biro UASD
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	12	1.901.647.730	12	2.009.851.453	12	6.820.761.814	12	2.384.678.569	12	2.606.362.517	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 3. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 4. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 5. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 6. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 7. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026 Target	Rp	2027 Target	Rp	2028 Target	Rp	2029 Target	Rp	2030 Target	Rp	
													8. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD 9. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 10. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 11. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial 12. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2	3	258.621.240	3	284.554.377	3	313.092.470	2	342.745.687	3	378.772.485	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Kelompok Tata Praja - Biro Pemerintahan 3. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	20	21	4.193.110.564	21	4.416.939.574	21	4.657.800.916	21	4.917.379.669	21	5.197.568.091	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 3. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
													Keuangan 4. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 5. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 6. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 7. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 8. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 9. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengedalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial 10. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 11. Kelompok Tata Praja - Biro Pemerintahan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9	9	986.523.0 20	9	1.113.393. 093	9	1.258.587. 192	9	1.388.748. 536	9	1.614.221. 862	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			Target	2026 Rp	Target	2027 Rp	Target	2028 Rp	Target	2029 Rp	Target	2030 Rp	
													3. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 4. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 5. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 6. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 7. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 8. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial
Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2	2	2.760.807. 500	2	2.692.013. 905	2	2.978.359. 984	2	3.303.443. 185	2	3.673.612. 524	1. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD 2. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	25	8	1.523.427. 640	8	1.620.759. 211	8	1.725.073. 381	8	1.836.930. 879	8	1.956.941. 325	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 3. Kelompok Reformasi



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			Target	2026 Rp	Target	2027 Rp	Target	2028 Rp	Target	2029 Rp	Target	2030 Rp	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	32	36	4.316.799.888	36	4.468.211.560	36	4.637.063.123	36	3.600.783.448	36	5.147.436.181	Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 1. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD 2. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 3. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 4. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 5. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 6. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 7. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 8. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 9. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			Target	2026 Rp	Target	2027 Rp	Target	2028 Rp	Target	2029 Rp	Target	2030 Rp	
Penatausahaan arsip dinamis pada skpd	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada skpd	5	21	75.285.281	17	197.415.281	17	79.816.481	9	69.223.256	6	206.785.537	1. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 2. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 3. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 4. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengedalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada skpd	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada skpd	12	16	244.263.399	16	300.487.411	16	322.516.278	16	348.004.615	16	377.516.409	1. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 2. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 3. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 4. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai kepuasan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4	4	40.586.624.756	4	37.950.971.088	4	36.686.920.640	4	37.678.319.213	4	38.156.895.804	1. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 2. Bagian Rumah Tangga



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
													- Biro UASD 3. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 4. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 5. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 6. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 7. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5	5	4.296.390. 056	5	4.689.912. 736	5	5.129.798. 077	5	5.389.285. 904	5	6.134.450. 472	1. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 2. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 3. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 4. Kelompok Tata Praja - Biro Pemerintahan 5. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 6. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
													Pengedalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	353	327	34.539.07 3.529	316	25.316.05 8.352	317	26.447.12 2.563	317	27.679.03 3.309	314	29.022.44 5.332	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 3. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 4. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 5. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengedalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial 6. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 7. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 8. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 9. Bagian Administrasi Kepala Daerah - Biro Kepala Daerah



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			Target	2026 Rp	Target	2027 Rp	Target	2028 Rp	Target	2029 Rp	Target	2030 Rp	
													10. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 11. Kelompok otonomi daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan - biro pemerintahan 12. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 13. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0	1	1.751.161. 171	1	1.665.000. 000	1	1.110.000. 000	1	1.110.000. 000	0	0	Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0	0	0	10	3.500.000. 000	8	2.500.000. 000	6	2.000.000. 000	6	1.500.000. 000	Bagian Rumah Tangga - Biro UASD
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	245	0	0	5	2.780.000. 000	3	1.500.000. 000	3	1.500.000. 000	2	1.500.000. 000	Bagian Rumah Tangga - Biro UASD
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai kepuasan layanan administrasi umum perangkat daerah	4	4	74.287.68 5.647	4	79.775.14 8.628	4	88.107.61 4.922	4	97.329.54 1.697	4	108.432.6 34.540	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 3. Bagian Program,



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			Target	2026 Rp	Target	2027 Rp	Target	2028 Rp	Target	2029 Rp	Target	2030 Rp	
													Kuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD 4. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD 5. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 6. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 7. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 8. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 9. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	12	31.383.02 7.831	12	35.160.87 9.537	12	38.676.96 7.491	12	42.544.66 4.240	12	46.799.13 0.664	Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	104	40	3.845.996. 539	40	4.236.782. 468	40	4.677.790. 493	40	4.893.487. 883	40	5.693.290. 240	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD 3. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 4. Kelompok Pangan dan



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			Target	2026 Rp	Target	2027 Rp	Target	2028 Rp	Target	2029 Rp	Target	2030 Rp	
													Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 5. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 6. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 7. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 8. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 9. Kelompok Tata Praja - Biro Pemerintahan 10. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 11. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengedalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial 12. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa	96	48	39.058.661.277	48	40.377.486.623	48	44.752.856.938	48	49.891.389.574	48	55.940.213.636	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	pelayanan umum kantor yang disediakan												Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 3. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD 4. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 5. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai kepuasan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	4	4	55.251.556.691	4	50.772.894.726	4	55.001.197.518	4	57.841.084.390	4	62.823.002.252	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 3. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD 4. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD 5. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 6. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 7. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 8. Bagian Perjalanan



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
													Dinas - Biro Kerjasama Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	152	152	2.571.042.446	152	2.850.044.156	152	3.179.511.394	152	3.546.588.311	152	3.957.439.135	1. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD 2. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	203	241	651.169.265	237	717.825.540	244	792.649.162	247	840.748.077	255	965.370.778	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 3. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 4. Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah 5. Bagian Naskah Dinas - Biro Kepala Daerah 6. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 7. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengedalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial 8. Kelompok Pembangunan Kota -



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			Target	2026 Rp	Target	2027 Rp	Target	2028 Rp	Target	2029 Rp	Target	2030 Rp	
													Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	52	13	31.959.108.048	13	30.455.504.824	13	33.447.274.055	13	35.798.081.009	13	39.324.107.861	1. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 2. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	58	39	9.553.294.995	39	15.664.375.025	39	16.479.447.467	39	16.535.666.186	39	17.437.867.743	Bagian Rumah Tangga - Biro UASD
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	338	688	10.516.941.937	688	1.085.145.181	688	1.102.315.440	688	1.120.000.807	688	1.138.216.735	1. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 2. Bagian Rumah Tangga - Biro UASD
Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Nilai kepuasan layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	4	4	81.571.083.761	4	83.206.571.708	4	84.874.972.728	4	86.576.955.248	4	88.313.201.570	Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD
Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2	2	81.435.541.361	2	83.064.252.188	2	84.725.537.232	2	86.420.047.977	2	88.148.448.936	Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD
Pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala	2	2	135.542.400	2	142.319.520	2	149.435.496	2	156.907.271	2	164.752.634	Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah - Biro UASD



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	daerah dan wakil kepala daerah												
Fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	Nilai kepuasan layanan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	4	4	20.218.384.904	4	22.800.762.101	4	25.725.122.466	4	29.038.487.212	4	32.794.581.015	1. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD 2. Bagian Administrasi Kepala Daerah - Biro Kepala Daerah
Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	3	3	3.448.116.744	3	4.013.263.078	3	4.671.036.897	3	5.436.619.844	3	6.327.681.837	Bagian Administrasi Kepala Daerah - Biro Kepala Daerah
Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	3	3	2.914.775.000	3	3.392.506.623	3	3.948.538.458	3	4.595.703.911	3	5.348.939.782	Bagian Administrasi Kepala Daerah - Biro Kepala Daerah
Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	2	2	13.855.493.160	2	15.394.992.400	2	17.105.547.111	2	19.006.163.457	2	21.117.959.396	Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur - Biro UASD
Fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan	Nilai kepuasan layanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan	4	4	6.580.551.751	4	7.659.104.183	4	8.914.431.359	4	10.375.506.658	4	12.076.052.200	Bagian Persidangan - Biro Kepala Daerah
Penyiapan materi pimpinan	Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan	700	700	530.400.000	700	617.332.560	700	718.513.367	700	836.277.707	700	973.343.624	Bagian Persidangan - Biro Kepala Daerah
Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	12	12	6.050.151.751	12	7.041.771.623	12	8.195.917.992	12	9.539.228.951	12	11.102.708.576	Bagian Persidangan - Biro Kepala Daerah
Fasilitasi keprotokolan	Nilai kepuasan layanan fasilitasi keprotokolan	4	4	28.022.552.706	4	31.825.609.889	4	36.164.568.071	4	40.402.765.447	4	46.709.549.108	1. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
													UASD 2. Bagian Protokol - Biro Kepala Daerah 3. Bagian Administrasi Kepala Daerah - Biro Kepala Daerah 4. Bagian Persidangan - Biro Kepala Daerah
Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	48	36	24.087.90 8.067	36	27.246.07 6.994	36	30.834.44 9.734	36	34.199.04 0.715	36	39.489.03 3.892	1. Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan - Biro UASD 2. Kelompok otonomi daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan - biro pemerintahan 3. Bagian Persidangan - Biro Kepala Daerah
Fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	12	12	2.084.393. 614	12	2.426.025. 727	12	2.823.651. 344	12	3.286.447. 799	12	3.825.096. 594	Bagian Administrasi Kepala Daerah - Biro Kepala Daerah
Pengelolaan hubungan keprotokolan	Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan	12	12	1.850.251. 025	12	2.153.507. 168	12	2.506.466. 993	12	2.917.276. 933	12	3.395.418. 622	Bagian Protokol - Biro Kepala Daerah
Percepatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan	Persentase peningkatan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah daerah	0	100	597.471.3 55.078	100	614.040.0 10.383	100	619.186.6 41.681	100	624.375.8 77.929	100	629.704.8 27.034	
Program pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase upaya fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program	0	90	233.983.4 06.177	91	250.523.3 92.705	92	255.638.4 88.348	93	260.793.0 35.375	94	266.083.8 26.337	1. Kelompok otonomi daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan - biro pemerintahan 2. Kelompok pengaduan - biro pemerintahan 3. Kelompok Tata Praja -



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	pemerintahan dan otonomi daerah												Biro Pemerintahan 4. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan
	Persentase kerjasama dalam negeri yang terimplementasi	0	100		100		100		100		100		Bagian Kerja Sama Dalam Negeri - Biro Kerjasama Daerah
	Indeks kepuasan layanan administrasi dan keuangan perjalanan dinas	4	4		4		4		4		4		Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah
Pelaksanaan tugas pemerintahan	Persentase capaian rencana aksi kegiatan pelaksanaan tugas pemerintahan	93	90	229.599.275.004	91	245.984.804.088	92	250.937.545.350	93	255.990.695.002	94	261.146.333.028	1. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 2. Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan - Biro Pemerintahan 3. Kelompok Pengaduan - Biro Pemerintahan 4. Kelompok Tata Praja - Biro Pemerintahan
	Indeks kepuasan pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas	0	4		4		4		4		4		Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah
Pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan	5	5	4.258.172.345	5	4.364.626.654	5	4.473.742.320	5	4.585.585.878	5	4.700.225.525	1. Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan 2. Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan - Biro Pemerintahan 3. Kelompok Pengaduan



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
													- Biro Pemerintahan 4. Kelompok Tata Praja - Biro Pemerintahan
Fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan pemerintahan umum	4	4	225.139.788.674	4	241.404.368.842	4	246.232.456.219	4	251.157.105.343	4	256.180.247.450	Bagian Perjalanan Dinas - Biro Kerjasama Daerah
Fasilitasi penataan wilayah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan wilayah	5	5	201.313.985	5	215.808.592	5	231.346.811	5	248.003.781	5	265.860.053	Kelompok Kewilayahan dan Pemerintaan Umum - Biro Pemerintahan
Pelaksanaan otonomi daerah	Persentase capaian rencana aksi kegiatan pelaksanaan otonomi daerah	93	90	1.284.131.173	91	1.376.588.617	92	1.475.702.998	93	1.512.595.573	94	1.581.953.613	Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan - Biro Pemerintahan
Pengembangan otonomi dan penataan urusan	Jumlah dokumen hasil pengembangan otonomi dan penataan urusan yang dilaksanakan	5	5	1.115.499.320	5	1.195.815.271	5	1.281.913.971	5	1.313.961.820	5	1.374.211.776	Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan - Biro Pemerintahan
Evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah laporan hasil evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan	2	1	168.631.853	1	180.773.346	1	193.789.027	1	198.633.753	2	207.741.837	Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan - Biro Pemerintahan
Fasilitasi kerja sama daerah	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah	2	2	3.100.000.000	2	3.162.000.000	2	3.225.240.000	2	3.289.744.800	2	3.355.539.696	Bagian Kerja Sama Dalam Negeri - Biro Kerjasama Daerah
Fasilitasi kerja sama antar pemerintah	Jumlah kerja sama antar pemerintah yang difasilitasi	2	4	3.100.000.000	4	3.162.000.000	4	3.225.240.000	4	3.289.744.800	4	3.355.539.696	Bagian Kerja Sama Dalam Negeri - Biro Kerjasama Daerah
Program kesejahteraan rakyat	Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	4	4	362.517.008.504	4	362.517.008.504	4	362.517.008.504	4	362.517.008.504	4	362.517.008.504	1. Kelompok Kesehatan - Biro Kesejahteraan Sosial 2. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	di bawah koordinasi biro kesejahteraan sosial												3. Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga - Biro Kesejahteraan Sosial
	Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bawah koordinasi biro pendidikan dan mental spiritual	4	4		4		4		4		4		1. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 2. Kelompok Mental Spiritual - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 3. Kelompok pendidikan - biro pendidikan dan mental spiritual
Fasilitasi pembinaan mental spiritual	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan mental spiritual	4	4	361.776.5 48.504	4	361.776.5 48.504	4	361.776.5 48.504	4	361.776.5 48.504	4	361.776.5 48.504	Kelompok Mental Spiritual - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Fasilitasi kelembagaan bina spiritual	Jumlah lembaga bina spiritual yang difasilitasi	100	353	361.776.5 48.504	365	361.776.5 48.504	380	361.776.5 48.504	400	361.776.5 48.504	420	361.776.5 48.504	Kelompok Mental Spiritual - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar di bawah koordinasi biro pendidikan dan mental spiritual	4	4	447.610.0 00	4	447.610.0 00	4	447.610.0 00	4	447.610.0 00	4	447.610.0 00	Kelompok Pendidikan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
	Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar di	4	4		4		4		4		4		1. Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga - Biro Kesejahteraan Sosial 2. Kelompok



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	bawah koordinasi biro kesejahteraan sosial												Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial
Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan	18	18	248.700.0 00	18	248.700.0 00	18	248.700.0 00	18	248.700.0 00	18	248.700.0 00	Kelompok Pendidikan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan	13	13	161.510.0 00	13	161.510.0 00	13	161.510.0 00	13	161.510.0 00	13	161.510.0 00	Kelompok Kesehatan - Biro Kesejahteraan Sosial
Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial	Jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial	8	8	37.400.00 0	8	37.400.00 0	8	37.400.00 0	8	37.400.00 0	8	37.400.00 0	Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga - Biro Kesejahteraan Sosial
Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar di bawah koordinasi	4	4	292.850.0 00	4	292.850.0 00	4	292.850.0 00	4	292.850.0 00	4	292.850.0 00	Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	biro pendidikan dan mental spiritual												
	Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar di bawah koordinasi biro kesejahteraan sosial	4	4		4		4		4		4		1. Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga - Biro Kesejahteraan Sosial 2. Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengedalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial
Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata	21	25	202.750.000	25	202.750.000	25	202.750.000	25	202.750.000	25	202.750.000	1. Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 2. Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga - Biro Kesejahteraan Sosial
Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan	8	8	90.100.000	8	90.100.000	8	90.100.000	8	90.100.000	8	90.100.000	Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengedalian Penduduk - Biro Kesejahteraan Sosial



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			Target	2026 Rp	Target	2027 Rp	Target	2028 Rp	Target	2029 Rp	Target	2030 Rp	
	desa, transmigrasi dan tenaga kerja												
Program perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan sesuai dengan peraturan	100	100	144.846.173	100	159.330.790	100	175.263.869	100	192.790.256	100	212.069.282	1. Kelompok Keuangan Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 2. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 3. Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal - Biro Perekonomian dan Keuangan 4. Kelompok Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja - Biro Perekonomian dan Keuangan
Pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian dan keuangan yang disampaikan kepada pimpinan	100	100	144.846.173	100	159.330.790	100	175.263.869	100	192.790.256	100	212.069.282	1. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 2. Kelompok Keuangan Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan
Fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan ekonomi makro	2	2	144.846.173	2	159.330.790	2	175.263.869	2	192.790.256	2	212.069.282	1. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 2. Kelompok Keuangan Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
													Kelompok Keuangan Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan
Program kebijakan administrasi pembangunan	Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan	100	100	826.094.224	100	840.278.384	100	855.880.960	100	873.043.794	100	891.922.911	1. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 2. Kelompok Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja - Biro Perekonomian dan Keuangan 3. Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal - Biro Perekonomian dan Keuangan 4. Kelompok Keuangan Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan
	Persentase upaya pengendalian pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup	96,27	96,3		96,4		96,5		96,6		96,7		1. Kelompok Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 2. Kelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 3. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
													4. Kelompok Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
	Persentase upaya pengendalian pemenuhan kewajiban surat izin penunjukan penggunaan tanah (sippt)	35,82	45		47		48		50		52		Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase terkendalinya administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan	100	100	141.841.600	100	156.025.760	100	171.628.336	100	188.791.170	100	207.670.287	1. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 2. Kelompok Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja - Biro Perekonomian dan Keuangan 3. Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal - Biro Perekonomian dan Keuangan 4. Kelompok Keuangan Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan
Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan apbd	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan apbd	12	12	141.841.600	12	156.025.760	12	171.628.336	12	188.791.170	12	207.670.287	1. Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan 2. Kelompok Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
													Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja - Biro Perekonomian dan Keuangan 3. Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal - Biro Perekonomian dan Keuangan 4. Kelompok Keuangan Daerah - Biro Perekonomian dan Keuangan
Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase laporan hasil pemantauan yang diselesaikan tepat waktu	100	100	684.252.624	100	684.252.624	100	684.252.624	100	684.252.624	100	684.252.624	1. Kelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 2. Kelompok Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 3. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 4. Kelompok Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah	4	4	684.252.624	4	684.252.624	4	684.252.624	4	684.252.624	4	684.252.624	1. Kelompok Pembangunan Kota - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 2. Kelompok Pekerjaan



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
													Umum dan Perumahan Rakyat - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 3. Kelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 4. Kelompok Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah	Indeks kualitas kebijakan	58,43	63	3.326.846.846	67	4.004.089.373	71	3.903.827.535	75	4.489.401.667	80	4.461.936.671	
Program fasilitasi dan koordinasi hukum	Persentase produk hukum daerah yang diundangkan	0	60	3.326.846.846	62	4.004.089.373	63	3.903.827.535	64	4.489.401.667	65	4.461.936.671	1. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 2. Bagian Peraturan Perundang - Undangan II - Biro Hukum
	Persentase penanganan perkara litigasi yang diselesaikan	100	100		100		100		100		100		Bagian Advokasi Hukum - Biro Hukum
	Persentase penanganan perkara non litigasi yang diselesaikan	100	100		100		100		100		100		Bagian Pelayanan Hukum - Biro Hukum
Fasilitasi penyusunan perundang-undangan	Persentase produk hukum yang diharmonisasi sesuai target propempergub	100	100	998.620.273	100	1.148.413.314	100	1.320.675.311	100	1.518.776.609	100	1.746.593.098	1. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 2. Bagian Peraturan Perundang - Undangan II - Biro Hukum



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan	Jumlah produk hukum pengaturan yang disusun	55	85	689.997.200	70	793.496.780	60	912.521.297	50	1.049.399.492	40	1.206.809.415	1. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 2. Bagian Peraturan Perundang - Undangan II - Biro Hukum
Fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang disusun	1000	1500	67.700.000	1200	77.855.000	1000	89.533.250	900	102.963.238	800	118.407.723	1. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 2. Bagian Peraturan Perundang - Undangan II - Biro Hukum
Pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya	Jumlah produk hukum yang didokumentasi dan dikelola informasi hukumnya	8028	8500	240.923.073	9000	277.061.534	9500	318.620.764	9800	366.413.879	10000	421.375.960	1. Bagian Peraturan Perundang - Undangan I - Biro Hukum 2. Bagian Peraturan Perundang - Undangan II - Biro Hukum
Fasilitasi bantuan hukum	Persentase pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum	100	100	2.328.226.573	100	2.855.676.059	100	2.583.152.224	100	2.970.625.058	100	2.715.343.573	1. Bagian Advokasi Hukum - Biro Hukum 2. Bagian pelayanan hukum - biro hukum
Fasilitasi penyelesaian masalah hukum	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	40	40	2.173.256.573	40	2.677.460.559	40	2.378.204.399	40	2.734.935.059	40	2.444.300.074	Bagian Advokasi Hukum - Biro Hukum
Fasilitasi penyelesaian masalah non litigasi dan ham	Jumlah masalah non litigasi dan ham yang diselesaikan	0	50	154.970.000	50	178.215.500	50	204.947.825	50	235.689.999	50	271.043.499	Bagian Pelayanan Hukum - Biro Hukum
Tercapainya tata kelola organisasi perangkat daerah yang dinamis	Skor rencana aksi pembangunan rb	6,19	6,25	6.948.286.549	6,3	7.650.172.731	6,35	9.075.180.867	6,4	10.685.537.421	6,45	11.913.031.021	
	Skor tingkat keberhasilan pembangunan zi	0,75	1		1,25		1,5		1,75		2		
	Skor indeks berakhlak	80,09	80,5		81		81,5		82		83		
	Opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	5	5		5		5		5		5		



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program penataan organisasi	Persentase perangkat daerah yang berada pada tingkat kematangan minimal sedang	0	20	6.948.286.549	40	7.650.172.731	60	9.075.180.867	80	10.685.537.421	100	11.913.031.021	1. Kelompok Kelembagaan - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 2. Kelompok Analisis Jabatan - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 3. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 4. Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah evaluasi produktivitas dan efisiensi perangkat daerah	0	4	3.872.320.000	4	3.834.528.400	4	4.685.507.200	4	5.154.057.920	4	5.669.463.713	Kelompok Analisis Jabatan - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
	Persentase penataan jabatan pada perangkat daerah sesuai standar	100	100		100		100		100		100		Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Fasilitasi penataan kelembagaan provinsi	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan kabupaten/kota	1	9	2.892.255.000	4	2.854.463.400	4	3.499.628.550	4	3.849.591.405	4	4.234.550.546	Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Penataan analisis jabatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan	0	4	980.065.000	4	980.065.000	4	1.185.878.650	4	1.304.466.515	4	1.434.913.167	Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja	Persentase penyusunan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi	100	100	3.075.966.549	100	3.815.644.331	100	4.389.673.667	100	5.531.479.501	100	6.243.567.308	1. Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 2. Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik -



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
													Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi	0	2	830.789.946	2	962.633.107	2	1.059.052.969	2	1.581.244.710	2	1.581.244.710	Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	0	1	88.500.000	1	88.500.000	1	97.350.000	1	152.928.000	1	183.513.600	Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Evaluasi pelaksanaan budaya kerja	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja	0	1	774.319.603	1	929.183.524	1	1.115.020.228	1	1.338.024.274	1	1.605.629.129	Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Pengelolaan tatalaksana pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan tata laksana pemerintahan	0	4	1.216.707.000	4	1.338.377.700	4	1.472.215.470	4	1.619.437.017	4	1.781.380.719	Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Fasilitasi peningkatan pelayanan publik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik	0	4	165.650.000	4	496.950.000	4	646.035.000	4	839.845.500	4	1.091.799.150	Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Menguatnya inovasi, kolaborasi, dan daya tarik investasi													
Meningkatnya kolaborasi dan kemitraan strategis daerah	Nilai efektivitas kerjasama daerah (nekd)	0	4	32.915.218.447	4	34.455.837.034	5	35.150.203.775	5	35.858.720.351	5	36.581.682.883	
Meningkatkan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah	Persentase kerjasama terimplementasi	100	100	32.915.218.447	100	34.455.837.034	100	35.150.203.775	100	35.858.720.351	100	36.581.682.883	Bagian Kerja Sama Dalam Negeri - Biro Kerjasama Daerah
	Persentase kolaborasi yang terimplementasi	100	100		100		100		100		100		Bagian Kerjasama Luar Negeri - Biro Kerjasama Daerah
	Evaluasi kerja sama dan kolaborasi yang terimplementasi	0	100		100		100		100		100		Bagian Kerjasama Pihak Ketiga - Biro Kerjasama Daerah



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program penataan organisasi	Persentase kerjasama yang terimplementasi	100	100	32.915.21 8.447	100	34.455.83 7.034	100	35.150.20 3.775	100	35.858.72 0.351	100	36.581.68 2.883	1. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri - Biro Kerjasama Daerah 2. Bagian Kerjasama Luar Negeri - Biro Kerjasama Daerah 3. Bagian Kerjasama Pihak Ketiga - Biro Kerjasama Daerah
Fasilitasi kerja sama daerah	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah	2	2	32.915.21 8.447	2	34.455.83 7.034	2	35.150.20 3.775	2	35.858.72 0.351	2	36.581.68 2.883	1. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri - Biro Kerjasama Daerah 2. Bagian Kerjasama Luar Negeri - Biro Kerjasama Daerah 3. Bagian Kerjasama Pihak Ketiga - Biro Kerjasama Daerah
Fasilitasi kerja sama dalam negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	4	4	8.603.246. 219	4	8.775.311. 143	4	8.950.817. 366	4	9.129.833. 714	4	9.312.430. 388	1. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri - Biro Kerjasama Daerah 2. Bagian Kerjasama Pihak Ketiga - Biro Kerjasama Daerah
Fasilitasi kerja sama luar negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama luar negeri	4	4	24.311.97 2.228	4	25.505.52 5.891	4	26.015.63 6.409	4	26.535.94 9.137	4	27.066.66 8.120	Bagian Kerjasama Pihak Ketiga - Biro Kerjasama Daerah
Evaluasi pelaksanaan kerja sama	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	0	0	0	1	175.000.0 00	1	183.750.0 00	1	192.937.5 00	1	202.584.3 75	1. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri - Biro Kerjasama Daerah 2. Bagian Kerjasama Luar Negeri - Biro Kerjasama Daerah 3. Bagian Kerjasama Pihak Ketiga - Biro Kerjasama Daerah



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, terdapat 5 program prioritas yang disertai dengan kegiatan dan ataupun sub kegiatan utama untuk dapat mencapai tujuan dari renstra sekretariat daerah. Sesuai dengan identifikasi masalah pada awal renstra, maka program prioritas yang diutamakan diantaranya adalah yang terkait dengan SDM yaitu penyediaan remunerasi dan juga tunjangan bagi para ASN di sekretariat daerah. Program lain yang juga menjadi prioritas sesuai fungsi dari sekretariat daerah adalah penataan organisasi dengan kegiatan utama fasilitasi kerjasama antar daerah, dalam, dan juga luar negeri.

Tabel 4.4 Daftar subkegiatan prioritas untuk program prioritas pembangunan daerah

Program prioritas	Outcome	Kegiatan/subkegiatan	Ket.
Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Meningkatnya kepuasan terhadap layanan penunjang urusan pemerintahan daerah pada sekretariat daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah	
		Penyediaan gaji dan tunjangan asn	
	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas dukungan administrasi dan pelayanan internal pemerintah provinsi	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	
Program penataan organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Fasilitasi kerja sama daerah	
		Fasilitasi kerja sama dalam negeri	
	Meningkatkan kematangan perangkat daerah menuju perangkat daerah yang modern	Fasilitasi kerja sama luar negeri	
		Evaluasi pelaksanaan kerja sama	
Program pemerintahan dan otonomi daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Pelaksanaan tugas pemerintahan	
		Fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum	
		Pelaksanaan otonomi daerah	
		Fasilitasi kerja sama daerah	
		Fasilitasi kerja sama antar pemerintah	
Program fasilitasi dan koordinasi hukum	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi hukum	Fasilitasi penyusunan perundang-undangan	
		Fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan	
		Fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan	
		Pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya	
		Fasilitasi bantuan hukum	
		Fasilitasi penyelesaian masalah hukum	
		Fasilitasi penyelesaian masalah non litigasi dan ham	
Program perekonomian dan pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian, keuangan dan pembangunan	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	

Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta, 2025

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan renstra dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Untuk penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 – 2030. IKU dan IKK dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah tercantum pada tabel 4.5 dan 4.6 berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,6684	3,6684	3,6685	3,6686	3,6687	3,6688	
Nilai Efektivitas Kerjasama Daerah (NEKD)	0	4	4	5	5	5	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah

INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase kepuasan pelayanan kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	
Persentase fasilitasi pelayanan kepala daerah yang terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	
Persentase peningkatan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah daerah	0	100	100	100	100	100	
Indeks kualitas kebijakan	58,43	63	67	71	75	80	
Skor rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi	6,19	6,25	6,3	6,35	6,4	6,45	
Skor tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	
Skor Indeks BerAkhlak	80.09	80.5	81	81.5	82	83	
Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	5	5	5	5	5	5	
Persentase kerjasama terimplementasi	100	100	100	100	100	100	
Persentase kolaborasi yang terimplementasi	100	100	100	100	100	100	



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Evaluasi kerja sama dan kolaborasi yang terimplementasi	0	2	2	2	2	2	

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah 2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan program, kegiatan, dan anggaran yang terukur dan terarah. Realisasi Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029 diharapkan dapat mendukung tercapainya visi-misi serta tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta berhasil mendukung perbaikan fundamental untuk mencapai visi jangka panjang Jakarta Kota Global 2045. Tujuan Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 adalah *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan berkinerja optimal guna mengakselerasi inovasi dan kolaborasi untuk memperkuat daya saing serta daya tarik Jakarta sebagai pusat ekonomi dan investasi global”*. Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Renstra 2025-2029 adalah (1) *Meningkatnya kualitas kebijakan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pelayanan administratif dan (2) Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan strategis daerah.*

5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 berfungsi sebagai acuan kerja dan ukuran keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah tahun 2025 - 2029. Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029 menjadi input untuk evaluasi kinerja dalam tugas dan fungsinya setiap tahunnya. Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 memiliki indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci sebagai target yang akan dicapai oleh setiap unsur Biro setiap tahunnya. Realisasi ketercapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 adalah perwujudan dari alokasi anggaran setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan setiap tahunnya.

Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran Renstra yang ditetapkan sangat diperlukan pemantauan dan pengawasan, dukungan, serta komitmen yang berkelanjutan dari setiap unit kerja. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2025-2029



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA